

LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENYUSUNAN INDEKS KESENJANGAN WILAYAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025



KERJA SAMA:



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Bekerja sama dengan:



Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Brawijaya

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN LITERATUR	15
2.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	15
2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.2. Teori Pembangunan Ekonomi	17
2.1.3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	19
2.1.4. Pembangunan Ekonomi Regional	20
2.2. Kesenjangan Wilayah	22
2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto.....	23
2.2.2. Konsumsi Rumah Tangga	25
2.2.3. Distribusi Pendapatan	29
2.3. Kesenjangan Pembangunan Regional.....	29
2.4. Peran Spasial Dalam Pembangunan Ekonomi.....	32
2.4.1. Teori Tempat Sentral (<i>Central Place Theory</i>)	39
2.4.2. Teori Kutub Pertumbuhan (<i>Growth Pole Theory</i>).....	41
2.4.3. Teori Konvergen (<i>Convergence Theory</i>).....	42
2.4.4. Teori Divergen (<i>Divergence Theory</i>).....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan Penelitian.....	45
3.2. Diagram Alir Penelitian	46
3.3. Jenis dan Sumber Data	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Data-data yang Dibutuhkan	48
3.6. Metode Analisis.	48

3.6.1.	Indeks Williamson	49
3.6.2.	Koefisien Gini	49
3.6.3.	Kurva Lorentz	50
3.6.4.	Analisis SEM PLS (<i>Structural Equation Modeling – Partial Least Squares</i>)	51
3.6.5.	Analisis Deskriptif Interpretatif	54
3.6.6.	Analisis IFAS-EFAS.....	54
3.7.	Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.....	60
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PASURUAN.....	62
4.1.	Aspek Geografis	62
4.2.	Aspek Perekonomian.....	64
4.2.1.	Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Pasuruan.	64
4.2.2.	Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan.	66
BAB V	INDEKS KESENJANGAN WILAYAH DI KABUPATEN PASURUAN	68
5.1.	Potensi Pembangunan Kabupaten Pasuruan.	68
5.1.1.	Analisis Tipologi Klassen.	69
5.1.2.	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).	73
5.1.3.	Analisis <i>Shift Share</i>	76
5.2.	Hasil Estimasi Indeks Williamson dan Gini Ratio Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.	81
5.2.1.	Hasil Estimasi Indeks Williamson dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	83
5.2.2.	Hasil Estimasi Indeks Gini dalam Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	92
5.3.	Hasil Identifikasi Penyebab Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	97
5.4.	Rumusan Strategi Pembangunan dalam Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan.....	103

BAB VI PENUTUP	118
6.1. Kesimpulan.....	118
6.2. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel 3. 1	Kebutuhan Data Sekunder dan Sumber Data.....	48
Tabel 3. 2	Variabel Eksogen dalam Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	52
Tabel 5. 1	Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tipologi Klassen, 2024	69
Tabel 5. 2	Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Pasuruan, 2020 - 2024	71
Tabel 5. 3.	Location Quotient Sektor Ekonomi Kabupaten Pasuruan, 2015-2024	74
Tabel 5. 4	Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Pasuruan, 2011-2024	78
Tabel 5. 5	Uji Stationeritas dan Signifikansi Indeks Willamson dan Gini Kabupaten Pasuruan.....	83
Tabel 5. 6	Forecasting PDRB ADHB Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (dalam Miliar).....	84
Tabel 5. 7	PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, 2025 (dalam Miliar)	85
Tabel 5. 8	Kelompok Pengeluaran, Rata-rata pengeluaran perkapita, Proporsi Jumlah Penduduk, dan Persentase Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.....	94
Tabel 5. 9	Hasil Pengujian Konsistensi, Validitas, dan Pembobotan Data di Masing-masing Variabel	98
Tabel 5. 10	Component Score Tiap Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan	104
Tabel 5. 11	Nilai Bobot Tiap Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan	105
Tabel 5. 12	Nilai Rating Tiap Variabel yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan	106
Tabel 5. 13	IFAS Kabupaten Pasuruan, 2025.....	107
Tabel 5. 14	EFAS Kabupaten Pasuruan, 2025.....	108
Tabel 5. 15	Rumusan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.....	112
Tabel 5. 16	Rumusan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan.....	114

Daftar Gambar

Gambar 1.1	PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011 - 2024.....	3
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2024	4
Gambar 1.3	IPM Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010 - 2024	6
Gambar 1.4	Gini Rasio dan Willamson Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 - 2024	7
Gambar 3. 1	Tahapan Penelitian.....	46
Gambar 3.2.	Diagram IFAS-EFAS.....	58
Gambar 4.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.	62
Gambar 4.2	Jarak Wilayah Kecamatan ke Pusat Wilayah Kabupaten Pasuruan.	63
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024	64
Gambar 4.4	Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024.....	65
Gambar 4.5.	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2012-2024	67
Gambar 5. 1.	Peta Sebaran PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025	86
Gambar 5. 2.	Indeks Willamson Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 - 2025	88
Gambar 5. 3.	Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, 2014-2025.....	95
Gambar 5. 4.	Kurva Lorenz (Proporsi Persebaran Pengeluaran/Pendapatan Penduduk) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.	96
Gambar 5. 5.	Hasil Analisis Variabel yang Mempengaruhi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.....	100
Gambar 5. 6	Posisi Kabupaten Pasuruan dalam Kuadran SWOT, 2025 ..	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang di gadang-gadang sejak tahun 1999 menjadi pemicu pembangunan inklusif hingga tingkat pemerintahan terbawah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 tentang dana perimbangan, dan di amandemen menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta di amandemen kembali menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Atas dasar undang-undang tersebut, daerah di beri kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, tanpa banyak intervensi dari pusat (Suparto, 2017).

Harapan besar dari pemerintah pusat atas munculnya konsep otonomi daerah tidak lain adalah (Badan Pengkajian MPR RR, 2018):

1. Meringankan beban pemerintah pusat. Dengan mendelegasikan sebagian tugas, pemerintah pusat dapat lebih fokus pada kebijakan berskala nasional dan mendasar.
2. Meringankan partisipasi politik. Memberikan ruang bagi masyarakat di daerah untuk lebih aktif dalam pengelolaan pemerintahan.
3. Mengembangkan daerah secara optimal. Memungkinkan setiap daerah untuk memanfaatkan potensi lokalnya secara efisien dan merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

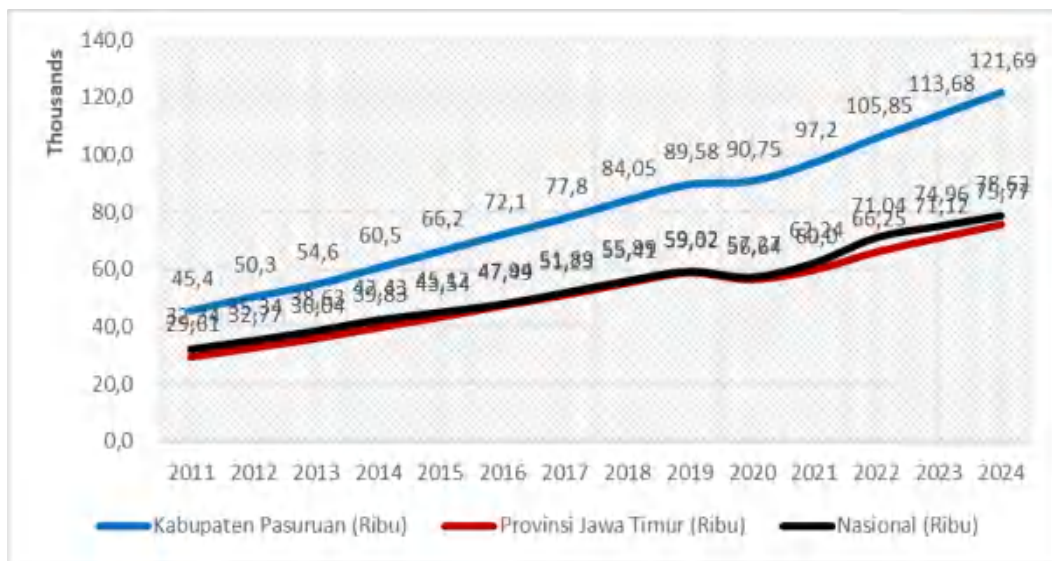
Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah kualitas sumber daya manusia, potensi ekonomi daerah, kemampuan struktur organisasi, serta dukungan politik nasional (Gladisya, Sihombing, dan Silvia, 2022).

Pembangunan daerah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, tentu akan hanya menjadi sebuah *utopia* jika tidak dibarengi dengan penguatan di beberapa sektor. Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa fakta-fakta yang terjadi pasca ditetapkannya otonomi daerah, diantaranya (Pratama, dkk. 2025):

1. Keterbatasan sumberdaya. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang terampil menjadi hambatan utama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
2. Tumpang tindih kewenangan. Sering terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yang menghambat kinerja.
3. Ketergantungan fiskal. Banyak daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat, yang membatasi kemandirian daerah dalam mengelola anggaran dan pembangunan.
4. Korupsi. Munculnya kasus korupsi oleh oknum di tingkat daerah menjadi masalah serius yang merusak implementasi otonomi daerah.
5. Buruknya koordinasi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali tidak optimal, yang menyebabkan hambatan dalam alokasi dana dan pelaksanaan kebijakan.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di daerah
7. Ketimpangan pembangunan. Terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah, di mana daerah yang kaya cenderung lebih maju sementara yang miskin tertinggal.
8. Tantangan globalisasi. Daerah perlu beradaptasi dengan persaingan global yang semakin ketat dan masalah lingkungan global seperti perubahan iklim.

Guna mengoptimalkan pembangunan inklusif sesuai cita-cita pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2018 melakukan kajian tentang indeks kesenjangan wilayah. Kajian ini menjadi penting lantaran masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi yang beragam dan harus dikaji lebih lanjut guna mengoptimalkan kebijakan (lebih tepat sasaran) sehingga pembangunan inklusif dapat terlaksana dengan baik.

Kajian untuk mencapai Pembangunan inklusif tentu saja dimulai dari analisis beberapa fakta dan data yang dapat dijadikan indikator kinerja dan capaian daerah. Diliat dari perkembangan PDRB/Kapita, Kabupaten dari tahun 2011 hingga 2024 selalu berada posisi teratas jika dibanding dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional (Gambar 1.1).



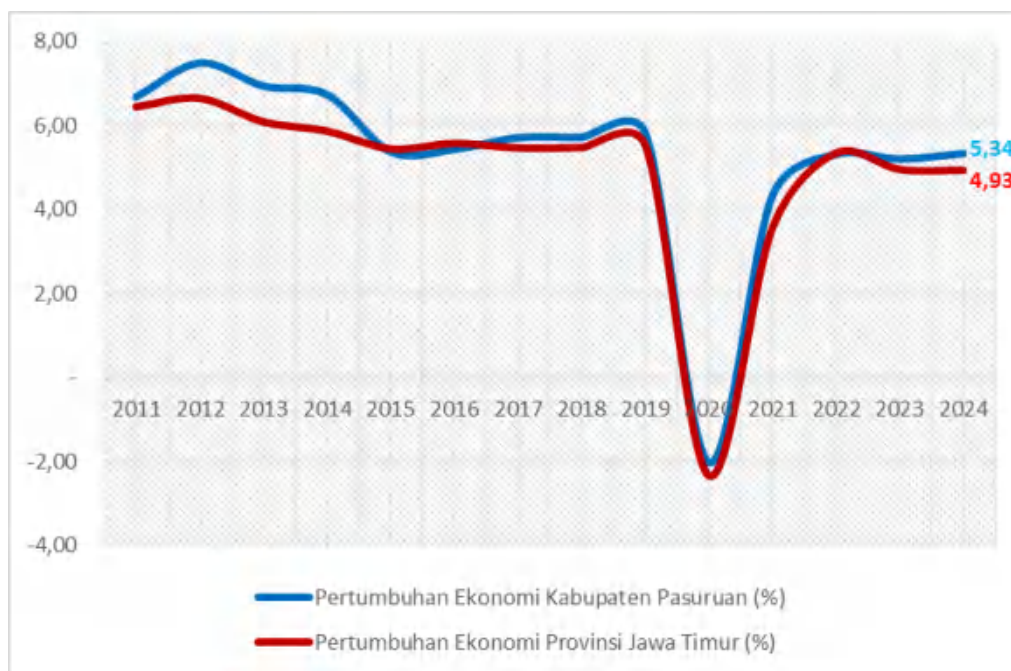
Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.1 PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011 - 2024

Dari gambar 1.1 dapat dipahami bahwa pada tahun 2011 PDRB/kapita Kabupaten Pasuruan berada di angka 45,4 (dalam ribu). Hal ini berada diatas Provinsi Jawa Timur yaitu 29,61 (dalam ribu) dan Nasional yaitu 32,34 (dalam ribu). Perkembangan PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan terus berada di atas

provinsi dan nasional bahkan mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Pada tahun 2024 posisi PDRB/Kapita Kabupaten Pasuruan masih berada di atas provinsi maupun nasional. Dimana Kabupaten Pasuruan di angka 121,69 (dalam ribu) sedangkan provinsi di angka 75,77 (dalam ribu) dan nasional di angka 78,61 (dalam ribu).

Bukan hanya PDRB/Kapita yang menunjukkan perkembangan cukup bagus di Kabupaten Pasuruan, beberapa indikator makro seperti: (i) laju pertumbuhan ekonomi; (ii) IPM; (iii) tingkat kemiskinan; (iv) gini rasio; (v) pengangguran; dan (vi) Indeks Kesenjangan Wilayah juga menunjukkan nilai yang cukup bagus. Di lihat dari laju pertumbuhan ekonomi, dari tahun 2011 hingga 2024, Kabupaten Pasuruan rata-rata angkanya (walaupun angkanya sedikit fluktuatif) berada diatas provinsi (lihat gambar1.2).



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2024

Gambar 1.2 dapat dipahami bahwa pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada di angka 6,69% sedangkan Provinsi Jawa

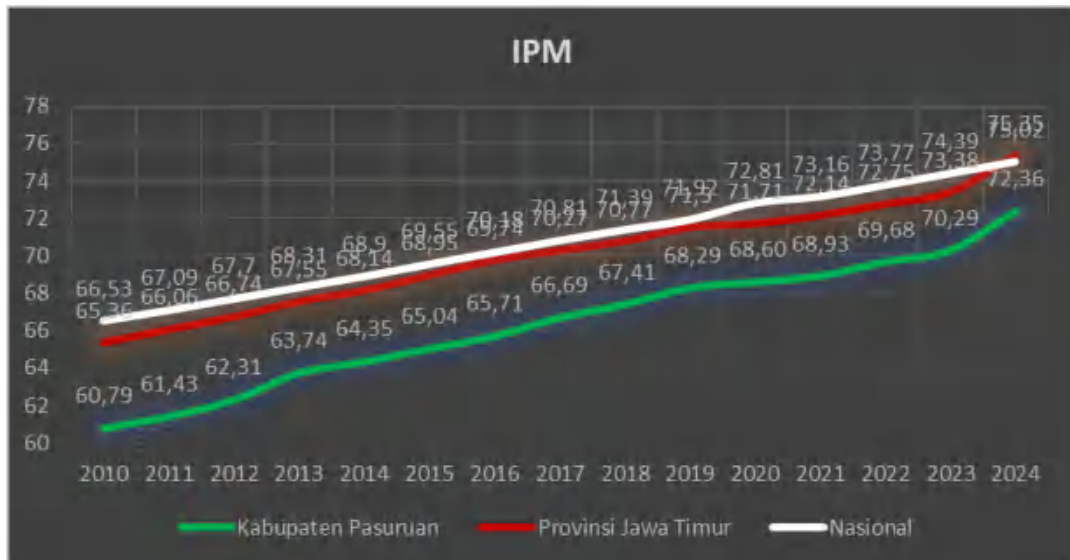
Timur 6,44%. Angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan ini mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi 7,50% sedangkan Provinsi Jawa Timur 6,64%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend menurun di tahun 2012 hingga tahun 2015, dan mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2019.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 tidak lain karena adanya pelambatan laju ekspor dan penurunan daya beli masyarakat. Pada tahun 2019 hingga 2020, secara global pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan signifikan lantaran adanya pandemi Covid-19. Guncangan ini juga turut dirasakan oleh sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Laju pertumbuhan ekonomi menurun drastis mencapai -2,03%. Sektor-sektor ekonomi banyak yang berhenti beroperasi, daya beli masyarakat menurun, kendala pemasaran serta rantai pasok bahan baku terhambat. Dampak terbesarnya adalah tingginya angka PHK yang mencapai 4.481 orang (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, 2021).

Akan tetapi, pada tahun 2021, kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan. Sektor-sektor produktif mulai bergeliat karena pemasaran dan rantai pasok bahan baku dapat berjalan dengan baik. Tak heran, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mencapai 4,34%. Angka ini terus meningkat hingga 2024 mencapai 5,34% atau berada di atas Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 4,93%.

Indikator makro berikutnya yang digunakan untuk melihat capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Pasuruan yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan ukuran komposit yang mengukur pencapaian di tiga bidang dasar: (i) umur panjang dan sehat; (ii) pengetahuan; serta (iii) standar hidup yang layak (BPS, 2024). Indeks ini diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan digunakan untuk menilai pembangunan manusia di

suatu wilayah, yang tercermin dari nilai IPM yang tinggi (BPS, 2014). Dalam hal IPM, dari tahun 2010 hingga 2024 Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur maupun Nasional (Gambar 1.3). Akan tetapi, nilai IPM dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Pasuruan selalu menunjukkan peningkatan.



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

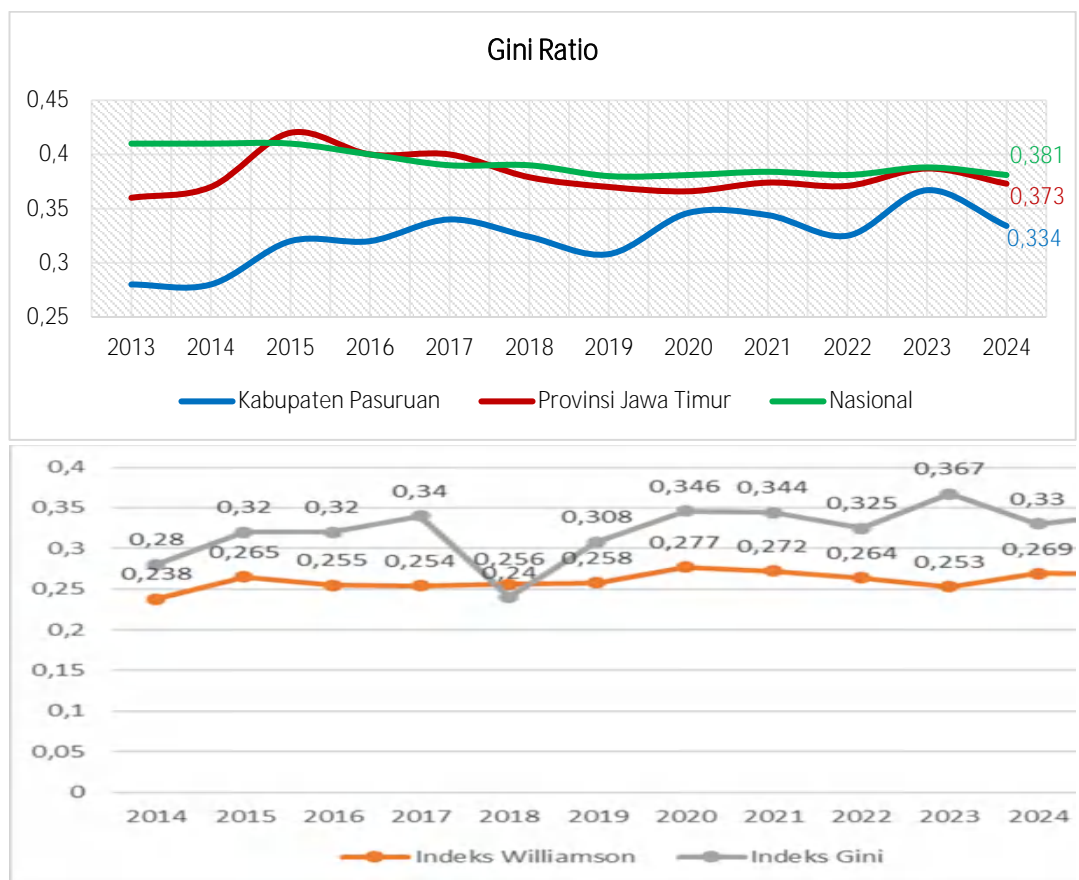
Gambar 1.3 IPM Kabupaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2010 - 2024

Dari gambar 1.3 dapat dipahami bahwa pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Pasuruan berada di angka 60,79%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada di angka 65,36% dan Nasional 66,53%. Angka ini tiap tahun selalu meningkat hingga tahun 2024. Dimana untuk Kabupaten Pasuruan berada di angka 72,36%, Provinsi Jawa Timur berada di angka 75,35%, dan Nasional berada di angka 72,02%. Indikator makro dari IPM tersebut walaupun nilainya terus meningkat setiap tahun, akan tetapi perlu menjadi penanda dan bahan evaluasi bagi Kabupaten Pasuruan untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga nilainya mampu melampaui Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

Berikutnya, yang menjadi salah satu indikator pembangunan daerah yaitu dapat dilihat dari kesenjangan individu penduduk (Gini Rasio/Indeks Gini). Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah,

dengan nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna) (BPS, 2014). Indeks Gini bisa diartikan sebagai ukuran pemerataan distribusi hasil pembangunan (pemerataan distribusi kue ekonomi) antar penduduk di suatu negara atau wilayah (Todaro, 2018) Nilai yang lebih mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sementara nilai yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Indeks ini sering digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi di antara penduduk suatu negara atau kelompok sosial (World Bank, 2020).

Berdasar nilai indeks gini di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan trend fluktuatif dan selalu meningkat (gambar 1.4). Artinya tingkat kesenjangan antar penduduk di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan.



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 1.4 Gini Rasio dan Willamson Kapubaten Pasuruan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 - 2024

Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan berdasar gambar 1.4 dari tahun 2014 hingga 2023 memang menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Akan tetapi nilai indeks gini masih masuk kategori rendah (nilainya di bawah 0,4) dan selalu berada di bawah Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Bahkan pada tahun 2024, angka indeks gini di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan cukup tajam yaitu 0,334 (rendah). Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada di angka 0,373 (rendah) dan nasional berada di angka 0,381 (rendah).

Indikator berikutnya yang di pakai untuk melihat capaian kinerja Kabupaten Pasuruan adalah Indeks Kesenjangan Wilayah (Williamson). Indeks Williamson adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, seperti antar kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi (Todaro, 2018). Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan kesenjangan yang besar, sedangkan mendekati 0 menunjukkan kesenjangan yang kecil atau pembangunan yang lebih merata. Indeks ini membantu mengevaluasi ketimpangan distribusi pendapatan dan konsentrasi kemiskinan, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil.

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa Indeks Williamson di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan trend yang cenderung stabil dan masuk kategori rendah. Pada tahun 2014, Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan berada di angka 0,238 mengalami sedikit peningkatan di tahun 2015 menjadi 0,265, sedikit menurun di tahun 2016 menjadi 0,255 dan trendnya meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,258, meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,277, bahkan stabil hingga tahun 2024 menjadi 0,269. Angka tersebut dari tahun 2014 hingga 2024 masih masuk dalam kategori rendah.

Memang, dari tahun ke tahun beberapa indikator makro di Kabupaten Pasuruan menunjukkan trend yang sangat bagus dibanding dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Akan tetapi, indikator-indikator yang bagus tersebut bukan semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi terlenta. Justru dengan adanya indikator yang bagus semakin menjadi pemicu kinerja daerah untuk meningkatkan motivasi agar beberapa indikator tersebut semakin dipertahankan atau bahkan semakin di tingkatkan. Untuk itu, pada tahun 2025 ini, Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan Universitas Brawijaya menyusun kajian tentang indeks kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan. Kajian ini dirasa sangat penting guna mengetahui secara detail terkait pemerataan pembangunan hingga kecamatan.

Data-data yang digunakan dalam kajian ini adalah data skunder sebagai acuan indikator makro, dan data primer sebagai penguat untuk justifikasi apakah indikator dalam analisis makro tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Berdasar data BPS 2024, Beberapa faktor penopang pembangunan di Kabupaten Pasuruan diantaranya:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga
2. Industri pengolahan
3. Neraca perdagangan dari sektor pertanian
4. Pembangunan desa

Sedangkan faktor penentu ketimpangan di Kabupaten Pasuruan berdasar kajian ketimpangan wilayah yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dari tahun 2018 hingga 2024 diantaranya:

1. Perbedaan akses pendidikan. Daerah maupun individu masyarakat yang memiliki akses pendidikan lebih baik tentu saja akan lebih maju di banding dengan daerah lainnya.

2. Perbedaan akses ke lapangan kerja. Daerah yang berada di pusat pasar tenaga kerja umumnya akan lebih berkembang dan maju di banding dengan daerah yang sulit memiliki akses ke pasar tenaga kerja.
3. Perbedaan akses kepemilikan sumberdaya. Artinya, daerah dengan kapasitas kepemilikan sumberdaya (manusia maupun alam) yang lebih baik umumnya lebih maju di banding dengan daerah yang minim memiliki kapasitas kepemilikan sumberdaya.
4. Perbedaan sektor ekonomi (tradisional ke modern). Artinya, daerah yang menjalankan roda ekonomi lebih modern umumnya akan lebih berkembang dan maju secara ekonomi dibanding daerah lain yang perekonomiannya dijalankan secara tradisional.
5. Globalisasi dan teknologi. Artinya, daerah yang sumberdayanya telah memanfaatkan teknologi dan mampu masuk ke pasar global (industri ekspor) umumnya memiliki perkembangan ekonomi yang lebih maju di banding dengan daerah yang masih mengandalkan pasar lokal dengan teknologi tradisional.
6. Faktor sosial dan demografi. Faktor ini menjadi penting dimana masyarakat yang memiliki kecenderungan terbuka akan teknologi dan informasi serta dengan tingkat demografi berupa tenaga prdouktif umumnya cenderung lebih maju secara ekonomi dibanding dengan daerah yang minim dengan keterbukaan dan mengalami struktur demografis usia tidak produktif.
7. Kualitas layanan infrastruktur dan geografi. Artinya, kualitas layanan seperti akses jalan, sarana pendidikan, kesehatan, pasar, teknologi infomasi dan pemerintahan menjadi faktor penting dalam meningkatkan pembangunan di daerah. Daerah yang minim akses atau kualitas infrastrukturnya buruk dan terisolasi secara geografi biasanya lebih tertinggal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana potensi pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana perhitungan serta nilai indeks Williamson di Kabupaten Pasuruan tahun 2025?
3. Bagaimana hasil perhitungan indeks gini di Kabupaten Pasuruan tahun 2025?
4. Bagaimana bentuk rumusan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah diantaranya:

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Pasuruan.
2. Mengestimasi nilai Indeks Williamsom sebagai indikator kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.
3. Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.
4. Mengestimasi nilai Indeks Gini (Gini Ratio) sebagai indikator kesenjangan pendapatan antar penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang diharapkan dalam penelitian ini berdasar hasil paparan pada latar belakang diatas diantaranya:

1. Manfaat akademis. Penelitian mengenai kesenjangan wilayah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ekonomi regional, perencanaan pembangunan wilayah, dan kebijakan fiskal daerah. Secara spesifik:
 - a. Menyediakan kajian empiris tentang tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
 - b. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain untuk melakukan studi lanjutan, seperti analisis determinan ketimpangan, pola pertumbuhan spasial, maupun dampak kebijakan fiskal terhadap pemerataan pembangunan.
 - c. Mengembangkan model analisis spasial dan tipologi pembangunan (misalnya *Klassen Typology* atau Indeks Williamson) yang dapat diaplikasikan untuk daerah lain.
2. Manfaat Praktis bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di tingkat Kabupaten dan kecamatan. Beberapa manfaatnya antara lain:
 - a. Mengidentifikasi kecamatan tertinggal dan maju, serta memetakan faktor penyebab kesenjangan (aksesibilitas, infrastruktur, kualitas SDM, potensi ekonomi).
 - b. Menjadi dasar penyusunan prioritas program pembangunan wilayah, misalnya penguatan infrastruktur di wilayah selatan atau pengembangan sektor industri di wilayah utara.

- c. Mendukung efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal, seperti alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan riil wilayah.
 - d. Memberikan masukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen RKPD tahunan agar lebih berbasis data dan bukti empiris.
3. Manfaat Ekonomi dan Sosial. Hasil penelitian tentang kesenjangan wilayah berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat:
- a. Membantu merancang program pemerataan ekonomi lokal, seperti pengembangan UMKM berbasis potensi wilayah, revitalisasi pasar tradisional, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
 - b. Mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, khususnya di kecamatan yang tertinggal.
 - c. Mengurangi risiko migrasi internal berlebihan dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan, yang sering kali menyebabkan tekanan sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan.
4. Manfaat bagi Dunia Usaha dan Investasi.
- a. Memberikan informasi spasial yang jelas mengenai potensi ekonomi unggulan per kecamatan, sehingga memudahkan investor dalam mengambil keputusan.
 - b. Mendorong sinergi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, pertanian, maupun logistik.
 - c. Menjadi dasar pengembangan klaster ekonomi berbasis sumber daya lokal (misalnya agroindustri di wilayah selatan dan manufaktur di wilayah utara).

5. Manfaat Strategis dan Jangka Panjang

- a. Mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) serta tujuan ke-10 (mengurangi ketimpangan).
- b. Menjadi bahan pertimbangan dalam reorientasi kebijakan pembangunan wilayah menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.
- c. Membantu Kabupaten Pasuruan menyiapkan diri menghadapi transformasi ekonomi daerah berbasis industri, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua konsep yang sering digunakan dalam membahas ekonomi. Pembangunan pada dasarnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmu ekonomi baik secara mikro maupun makro. Pembahasan ilmu ekonomi (*economics*) selalu berkaitan dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (*scarcity*), serta pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar.

2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono dalam Tarigan (2007) didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Atau dalam ranah teori dikatakan bahwa ekonomi tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita. Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada

pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari: (i) masa berburu, (ii) masa berternak, (iii) masa bercocok tanam, (iv) masa perdagangan, dan (v) tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi dan pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Menurut Simon Kuznets (dalam Todaro 2000) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut terwujud, maka salah satu indikatornya adalah adanya perubahan PDRB atau PDRB perkapita dari tahun ke tahun. Adapun rumus dalam menentukan tingkat (laju) pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$\text{Laju Pertumbuhan } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

$PDRB_t$ adalah PDRB tahun tertentu (tahun t),

$PDRB_{t-1}$ adalah PDRB tahun sebelumnya sebagai pembanding (t-1)

2.1.2. Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam Ekonomi Pembangunan, kajian mengenai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan pembangunan ekonomi (*economic development*) menempati posisi yang cukup penting di kalangan para ekonom. Kajian ini setidaknya dimulai ketika ekonom mengamati fenomena-fenomena penting yang dialami dunia dalam dua abad belakangan ini. Perkembangan perekonomian dunia selama dua abad ini telah menimbulkan dua efek yang sangat penting, yaitu : pertama, kemakmuran atau taraf hidup yang semakin meningkat yang dicapai oleh masyarakat dunia, kedua, terciptanya kesempatan kerja baru kepada penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Ekonomi pembangunan pada dasarnya telah melewati tiga fase yang berbeda. Fase *pertama*, adalah Ekonomi Pembangunan klasik yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja kapitalisme dengan slogannya yang terkenal *laissez faire*. Fase ini bertahan lebih kurang satu abad sejak publikasi *The Wealth of Nation*, karya Adam Smith tahun 1776.

Fase *kedua*, dimulai setelah perang dunia kedua dan ketika sejumlah negara dunia ketiga memperoleh kemerdekaannya. Oleh karena banyak negara-negara yang baru merdeka, maka analisis masalah yang berkenaan dengan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian. Pada fase ini fokus perhatian

berpindah dari ekonomi liberalisme klasik kepada Neo Klasik. Strategi yang dipegang adalah ketergantungan yang lebih kecil kepada pasar dan peranan yang lebih besar dari pemerintah dalam perekonomian. Kapitalisme *laissez faire* telah kehilangan peran ketika itu, akibat peristiwa *Great Depression* (1929-1932). Ekonom yang sangat berperan dalam fase ini adalah John Maynard Keynes dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* yang diterbitkan tahun 1936. Pada fase inilah ekonomi Keynesys dan sosialis memperoleh momentum di dunia Barat.

Sedangkan fase *ketiga* memiliki fokus yang berbeda dengan fase kedua. Dalam fase ketiga ini perhatian Ekonomi Pembangunan cenderung anti kekuasaan (negara) dan kembali pro kepada kebebasan pasar. Fase ini terjadi mulai tahun 1970 an, yaitu ketika pelaksanaan startegi Keynes dan sosialis mulai melemah. Pada fase ini ekonomi neoklasik mulai "*comeback*" dan menjadi paradigma yang dominan.

Ketiga fase tersebut, menunjukkan inkonsistensi dan ketidakpastian dalam program pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara muslim. Inkonsisten tersebut melahirkan analisis dan resep kebijakan yang bertentangan dan ini sangat membahayakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang yang hendak melaksanakan pembangunan dengan model barat mengalami kebingungan karena pertentangan-pertentangan konsep antara neo klasik ala Keynes dengan liberalism klasik (ekonomi pasar yang mereduksi peran negara dalam ekonomi) yang diajarkan Adam Smith. Kebingungan negara-negara berkembang itu juga dipengaruhi oleh konsep-konsep pembangunan dari negara-negara yang menerapkan sistem sosialis.

2.1.3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Sirojuzilam (2008) mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Adisasmita (2008), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan (Arsyad, 1999).

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan segenap potensi yang dimilikinya baru. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi

bagi corak pembangunan yang akan diterapkan. Peniruan terhadap pola kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya.

Dengan demikian pola kebijakan pembangunan yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu penelitian yang mendalam tentang keadaan dan potensi tiap daerah harus dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan arah perencanaan pembanguan daerah yang bersangkutan. Masalah pokok pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

2.1.4. Pembangunan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Richardson, 1991).

Menurut Sirojuzilam (2008), perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (factors movement). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan.

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayahwilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interrelasi.

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut.

2.2. Kesenjangan Wilayah

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun (Syafrizal, 2008).

Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah maka akan semakin terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2004).

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Dimana:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

- Y_i = PDRB per kapita daerah i
 Y = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
 F_i = Jumlah penduduk daerah i
 N = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan

indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

2. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan inventori dan (e) ekspor netto (merupakan ekspor dikurangi impor).

3. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

PDRB perkapita sebagai proxy dari pendapatan perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dan adanya aktivitas produksi. Sedangkan PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikut sertaannya dalam proses produksi. Kedua indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran

2.2.2. Konsumsi Rumah Tangga

Dilihat dari arti ekonomi, konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Draham Bannoch dalam bukunya *‘economics’* memberikan pengertian tentang konsumsi yaitu merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu (dalam satu tahun) pengeluaran. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi.

Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makro ekonomi yang dilambangkan "C". Konsep konsumsi yang merupakan konsep yang di Indonesiakan dalam bahasa Inggris "*Consumption*", merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumahtangga ke atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pembelanjaan tersebut atau juga pendapatan yang dibelanjakan. Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga.

Pengeluaran atau konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumahtangga saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan kedalam pengeluaran rata-rata sebulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga ialah:

A. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu:

1. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah

tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

2. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan financial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposable.

3. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*opportunity cost*) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

4. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestic dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

B. Faktor Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relative rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

2. Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain:

- a. Makin banyak penduduk yang berusia kerja atau produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- b. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- c. Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

C. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor social budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

2.2.3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada dibawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi, dan karenanya membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Masalah utama dalam distribusi pendapatan sebuah daerah adalah ketidakmerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dalam daerah tersebut, oleh karenanya sering juga disebut tingkat ketidakmerataan atau kesenjangan (*inequality*).

Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak juga.

2.3. Kesenjangan Pembangunan Regional

Pembahasan mengenai kesenjangan tidak dapat terlepas dari Hipotesis Williamson. Berdasarkan kerangka tersebut, hubungan antara kesenjangan antarwilayah dan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik. Pada periode awal pembangunan, ekonomi akan terkonsentrasi pada satu atau beberapa wilayah.

Pertumbuhan ekonomi selanjutnya menyebar ke wilayah-wilayah lainnya seiring dengan meningkatnya ukuran pasar (Tirado, Díez-Minguela, & Martínez-Galarraga, 2016).

Pemahaman mengenai kesenjangan antarwilayah kemudian diperluas oleh Myrdal dengan memperkenalkan konsep spread effect dan backwash effect (Amalia, Santoso, & Sasongko, 2018). Spread effect mengacu pada efek penyebaran hasil-hasil pembangunan di pusat pertumbuhan ke wilayah-wilayah sekitarnya, sedangkan backwash effect mengacu pada efek penyerapan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dari wilayah pinggiran ke pusat pertumbuhan. Kesenjangan antarwilayah semakin melebar apabila backwash effect lebih kuat pengaruhnya daripada spread effect. Dengan kata lain, kesenjangan antarwilayah disebabkan adanya kebijakan penguatamaan pusat pertumbuhan (*growth pole policies*) dan strategi pertumbuhan tidak seimbang (*unbalanced growth strategy*).

Pembahasan mengenai kesenjangan antarwilayah juga dibahas di dalam literatur teori pertumbuhan neoklasik, dimana kesenjangan antarwilayah bersifat sementara. Pada prinsipnya, kondisi awal suatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda sehingga kondisi steady state yang didapati berbeda pula. Namun demikian, teori pertumbuhan neoklasik meyakini akan terjadi konvergensi, dimana daerah miskin akan mampu menyusul daerah kaya. Meminjam istilah Barro dan Sala-i-Martin (2004), terdapat dua konvergensi akan terjadi pada pembangunan ekonomi antarwilayah: (i) konvergensi absolut yaitu: konvergensi yang terjadi karena daerah miskin dengan pendapatan per kapita yang rendah mampu tumbuh lebih cepat daripada daerah kaya; dan (ii) konvergensi bersyarat yaitu: konvergensi terjadi karena daerah miskin mampu tumbuh lebih cepat

dengan memanfaatkan karakteristik struktural yang dimilikinya (infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).

Adapun teori yang dikembangkan *New Economic Geography* (NEG) menolak asumsi pertumbuhan neoklasik yang menganggap bahwa mobilitas faktor produksi dianggap sempurna. Mendasarkan pemikiran pada argumen Myrdal (Lovely, Liang, & Zhang, 2019), NEG menekankan bahwa arus modal cenderung memusat pada wilayah yang memiliki return yang lebih tinggi. Krugman (1998) mengungkapkan bahwa proses ini semakin kuat dikarenakan adanya keterkaitan ke depan dan ke belakang pada sektor industri. Pada ujungnya, keterkaitan yang kuat menghasilkan pembentukan hubungan antara wilayah inti (identik dengan sektor industri) dan wilayah pinggiran (identik dengan sektor pertanian). Struktur wilayah inti-pinggiran ini persisten selama manfaat yang diperoleh industri dalam mengonsentrasikan aktivitas ekonominya di wilayah inti cukup besar. Struktur wilayah inti-pinggiran ini menguat pada negara-negara yang sedang bertransisi seperti Rusia (Bradshaw & Vartapetov, 2013) dan Tiongkok (Wei & Ye, 2009) yang identik dengan peningkatan kesenjangan antar-wilayah.

Sejumlah fakta cenderung mendukung kemungkinan terbentuknya kurva evolusi ketidaksetaraan regional. Berdasarkan Kuznets (1955) dan Williamson (1965), memberikan analisis yang luas tentang topik tersebut dengan mempertimbangkan secara rinci mekanisme *spillover* yang mendorong terjadinya ketidaksetaraan regional sesuai dengan tahapan perkembangan suatu negara selama industrialisasi.

Menurut Williamson (1965), *spillover* dapat terjadi melalui sejumlah saluran seperti migrasi, aliran modal, kebijakan pemerintah dan perdagangan antar daerah. Berdasarkan bukti statistik untuk sejumlah negara antara akhir

abad XIX dan Perang Dunia II, Williamson menemukan beberapa hal yang mendukung terbentuknya hubungan non-linear antara ketidaksetaraan regional dan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan dua fakta empiris utama: **pertama**, kesenjangan regional lebih besar di negara-negara kurang berkembang dan lebih kecil di negara-negara yang lebih maju; serta **kedua**, seiring waktu, kesenjangan regional meningkat di negara-negara yang kurang berkembang dan semakin menurun di negara yang lebih maju. Dengan demikian, ketidaksetaraan pendapatan daerah dapat dianggap sebagai hasil sampingan dari proses pembangunan dan industrialisasi.

Kim dan Margo (2003) juga menunjukkan bahwa di beberapa negara, kebangkitan industrialisasi selama paruh kedua abad ke-19 telah meningkatkan kesenjangan pendapatan regional, di mana industri manufaktur terkonsentrasi di salah satu bagian negara dan spesialisasi dalam kegiatan pertanian terjadi di bagian yang lain. Namun, pada paruh kedua abad ke-20, struktur industri regional bersatu melalui penyebaran pertanian dan meningkatnya kegiatan jasa di seluruh bagian dari negara tersebut.

2.4. Peran Spasial Dalam Pembangunan Ekonomi

Ketergantungan spasial merupakan hukum dasar geografi yang dicetuskan oleh Tobler. Dalam karyanya, Tobler menyatakan bahwa suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan wilayah yang lain, namun kedua wilayah yang saling berdekatan akan lebih terhubung daripada kedua wilayah yang berjauhan (Miller, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa jarak antar satu wilayah dan wilayah lainnya lebih dekat akan memberikan dampak yang signifikan. Hukum geografi Tobler tersebut menjadi landasan bagi analisis statistik spasial autokorelasi untuk menganalisis hubungan antara jarak atau konektivitas. Dalam

analisis spasial, terdapat sebuah fakta bahwa masing-masing wilayah memiliki derajat keunikan dan pola tersendiri (Miller, 2004)

Dalam konteks ekonomi, pola spasial merupakan salah satu upaya yang secara kolektif dikenal dengan "*New Economic Geography*" yang mengembangkan pemikiran tentang dampak lokasi seperti aglomerasi, dimana perusahaan cenderung berkumpul membentuk wilayah industri (Krugman, 1995; Baldwin, 1999). Krugman menyatakan bahwa model geografi ekonomi secara eksplisit membahas kemungkinan dampak integrasi ekonomi terhadap distribusi geografis industri, menekan *trade-off* antara biaya tetap, skala ekonomi dan biaya transportasi. Tabuchi (2012) menyatakan bahwa model *new economic geography* membahas kecenderungan distribusi spasial dalam barang setengah jadi, biaya perjalanan, tanah untuk perumahan, biaya transportasi, heterogenitas perusahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Model *new economic geography* dikembangkan untuk menjelaskan jarak antara cluster individu terhadap industri tertentu.

Penelitian Tabuchi mengungkapkan bahwa model *new economic geography* yang menggambarkan distribusi spasial kegiatan ekonomi dua wilayah terlalu sederhana. Banyak daerah berinteraksi baik dalam perdagangan maupun dalam migrasi dimana lokasi geografis daerah tidak simetris menunjukkan bahwa biaya transportasi wilayah masing-masing berbeda. Sehingga memungkinkan distribusi spasial kegiatan ekonomi menjadi beragam.

Teori geografi ekonomi baru berupaya untuk menurunkan efek-efek aglomerasi dari interaksi antara besarnya pasar, biaya transportasi dan *increasing return* dari perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi ekonomi skala pada tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor produksi. Teori ekonomi

geografi baru menekankan pada adanya mekanisme kausalitas sirkular untuk menjelaskan konsentrasi spasial dari kegiatan ekonomi (Krugman, 1998). Dalam model tersebut kekuatan sentripetal berasal dari adanya variasi konsumsi atau beragamnya intermediate goods pada sisi produksi. Kekuatan sentrifugal berasal dari tekanan yang dimiliki oleh konsentrasi geografis dari pasar input lokal yang menawarkan harga lebih tinggi dan menyebarnya permintaan. Jika biaya transportasi cukup rendah maka akan terjadi aglomerasi.

Analisis spasial tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, namun juga berkaitan dengan aspek fundamental lainnya, yaitu kesehatan dan lingkungan. Keterkaitan antara analisis spasial dengan sektor kesehatan menjadi tren penelitian yang semakin berkembang dari waktu ke waktu (Santana, et.al 2015). Disparitas kesehatan yang terjadi di seluruh dunia tidak hanya berkaitan dengan faktor individu semata, namun juga dengan aspek social, ekonomi dan spasial (Wilkinson & Marmot, 2003). Meskipun pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan merupakan faktor fundamental yang harus diperhatikan untuk mengatasi terjadinya disparitas kesehatan, namun akses untuk mendapatkan fasilitas medis merupakan komponen penting bagi masyarakat untuk mendapatkan penanganan kesehatan yang cukup dan tepat (Wilkinson & Marmot, 2003). Joseph dan Phillips (1984) menjelaskan bahwa perbedaan pola spasial dapat berpengaruh terhadap akses kesehatan ke setiap wilayah di suatu negara, sehingga hal tersebut menimbulkan disparitas kesehatan dan kesejahteraan. Perencanaan spasial perlu dikaitkan dengan aspek kesehatan dan aspek fundamental lainnya seperti lingkungan, perumahan, transportasi, pendidikan dan budaya (Satinha, 2015). Integrasi model spasial dengan aspek fundamental tersebut akan menciptakan peluang keuntungan bagi aglomerasi

ekonomi dan juga dapat mereduksi biaya transportasi (Henderson, Kelly, & Taylor, 2000).

Selain berkaitan dengan kesehatan, analisis spasial juga berkaitan erat dengan lingkungan. Dalam kaitannya dengan lingkungan, perencanaan spasial berperan besar untuk membantu implementasi pembangunan berkelanjutan (Eggenberger & Partidario, 2000). Hubungan antara analisis spasial dengan aspek lingkungan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan fisik lingkungan dari segala macam bentuk polusi, penyakit bahkan kematian (Sexton, Zhang, & Chalfant, 2003). Dalam kaitannya dengan kesehatan fisik lingkungan, analisis spasial digunakan untuk mengamati sejauh mana kondisi kerusakan lingkungan dan kemudian menjadi alat bantu bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan terkait reduksi kerusakan lingkungan agar tidak mengakibatkan dampak negative.

Pertama kali analisis spasial digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah teori lokasi. Dimana teori ini memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Teori Lokasi menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk biaya angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2008).

Untuk menganalisis pembangunan wilayah, harus sepenuhnya memahami kekuatan-kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi atau dispersi

kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di atas dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, antara lain yaitu: penghematan secara skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*), serta penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Ketiga kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghematan skala (*scale economies*). Terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar sebagai akibat investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan, yang memungkinkan dilaksanakan pemanfaatan pabrik dan peralatan tersebut dalam skala besar dapat membagi-bagi beban biaya-biaya tetap pada berbagai unit terdapat dalam system produksi. Sebagai konsekuensinya, unit biaya produksi menjadi lebih rendah sehingga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Produksi pada skala besar dimaksudkan untuk menghindari unit biaya operasi yang eksekutif. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan hanya pada lokasi-lokasi yang melayani penduduk dalam jumlah besar, atau dengan perkataan lain mempunyai suatu pasar yang luas. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya penghematan skala internal memberikan manfaat pada konsentrasi penduduk dalam jumlah besar daripada jumlah penduduk yang sedikit, industri dan kegiatan-kegiatan lainnya.
2. Penghematan lokalisasi (*localization economies*). Jenis kedua, kekuatan yang terpenting konsentrasi industri diasosiasikan dengan penghematan yang dinikmati oleh semua perusahaan dalam suatu industri yang sejenis pada suatu lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah keluaran (total output) industri tersebut. Sebagai ilustrasi dapat

dikemukakan mengenai pabrik tekstil. Kasus disuatu wilayah yang belum berkembang, dimana terdapat kelayakan untuk mendirikan pabrik-pabrik modern ukuran kecil yang tidak membutuhkan investasi modal yang eksekif dan dapat beroperasi tanpa dilayani oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang tinggi dan spesialis. Berkelompok dan terkonsentrasinya pabrik-pabrik sejenis pada suatu daerah geografis tertentu, misalnya di daerah-daerah perkotaan, akan menciptakan penghematan lokalisasi dan akan meningkatkan pertumbuhan kota-kota tersebut.

3. Penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Penghematan urbanisasi diasosiasikan dengan pertambahan jumlah total (penduduk, hasil industri, pendapatan, dan kemakmuran) di suatu lokasi untuk semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Penghematan ini terkait pada kegiatan-kegiatan industri-industri dan sektor-sektor secara agregatif.

Keuntungan aglomerasi baru dapat muncul bilamana terdapat keterkaitan yang erat antara kegiatan ekonomi yang ada pada konsentrasi tersebut baik dalam bentuk keterkaitan dengan input (*Backward Linkages*) atau keterkaitan output (*Forward Linkages*). Dengan adanya keterkaitan ini akan menimbulkan berbagai bentuk keuntungan eksternal bagi para pengusaha, baik dalam bentuk penghematan biaya produksi, biaya angkut bahan baku, dan hasil produksi serta penghematan biaya penggunaan fasilitas karena beban dapat ditanggung bersama. Penghematan tersebut selanjutnya akan dapat menurunkan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha sehingga daya saingnya menjadi semakin meningkat. Penurunan biaya inilah yang selanjutnya mendorong terjadinya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang berada dalam kawasan pusat pertumbuhan tersebut.

Perkembangan teori lokasi adalah munculnya teori tempat Sentral (*Central Place Theory*). Dimana teori ini menjelaskan pola geografis dan struktur hierarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala (fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori tersebut dapat dikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentral mampu menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salah satu diantaranya adalah teori Perroux (kutub pertumbuhan) yang membahas perubahan-perubahan struktural pada tata ruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempat sentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan.

Pengembangan teori *central place* dalam pembangunan menjadi teori kutub pertumbuhan (*Growth Pole Theory*), dimana ketika ada kenyataan bahwa potensi dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda-beda satu sama lainnya. Sehingga usaha-usaha pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronisasikan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*). Terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geographic space and space*

dimension). Proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk percepatan pertumbuhan daerah.

Selanjutnya, teori *central place* yang telah mengalami perbaikan ini disintesakan dengan teori pertumbuhan neo-klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu secara alamiah (tanpa perlu intervensi pemerintah) justru akan memperbaiki kesenjangan. Teori ini terkenal dengan teori pertumbuhan konvergen (*Convergence Theory*). Kondisi pertumbuhan ekonomi yang konvergen terjadi karena adanya *spillover*, yaitu proses melubernya aktivitas ekonomi pada satu daerah ke daerah lainnya. Teori Konvergen dapat terjadi jika wilayah yang bersangkutan telah maju, maka kesenjangan pembangunan regional akan berkurang (*Convergence*). Berdasarkan pandangan neo-klasik, intervensi pasar justru memperburuk kesenjangan wilayah, karena intervensi pasar biasanya justru bersifat memperlambat proses penyesuaian pembangunan menuju pada keseimbangan.

2.4.1. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur hierarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada masa depan, atau dapat dikatakan tidak menjelaskan gejala-gejala (fenomena) pembangunan. Dengan demikian teori tersebut dapat dikatakan bersifat statis. Agar teori tempat sentral mampu menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka perlu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah. Salah satu diantaranya adalah teori Perroux (kutub

pertumbuhan) yang membahas perubahan-perubahan struktural pada tata ruang geografis. Atau dapat dikatakan teori tempat sentral merupakan dasar dari teori kutub pertumbuhan.

Teori tempat sentral sebagian bersifat positif karena berusaha menjelaskan pola aktual arus pelayanan jasa, dan sebagian lagi bersifat normatif karena berusaha menentukan pola optimal distribusi tempat-tempat sentral. Teori tempat sentral mempunyai kontribusi pada pemahaman interrelasi spasial dan kota-kota sebagai sistem di dalam sistem perkotaan.

Teori tempat sentral tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai pertumbuhan kota karena teori tersebut diformulasikan berdasarkan pembangunan daerah pertanian yang tersusun secara hierarkis dan berpenduduk merata. Dengan tumbuhnya kota-kota maka muncullah jasa-jasa yang tidak berkorelasi dengan pasar wilayah belakang. Sebagai contoh kehidupan kota metropolitan dapat mencipakan kebutuhan-kebutuhan sendiri (internal), misalnya peningkatan penyediaan fasilitas penyediaan air minum, listrik, angkutan umum, demikian pula kebutuhan fasilitas parkir. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pertumbuhan kota ternyata tidak sesederhana seperti persoalan pemasaran barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh tempat sentral. Analisis tempat sentral menekankan pada peranan sektor perdagangan dan kegiatan-kegiatan jasa daripada kegiatan-kegiatan manufaktur.

Kegiatan manufaktur dianggap sebagai kegiatan produktif non tempat sentral. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kota-kota besar dan kota-kota lainnya sering kali mengalami perluasan dalam hal lokasi manufaktur karena kota-kota yang bersangkutan merupakan pasar tenaga kerja yang luas dan pada umumnya memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi, dimana

perusahaan-perusahaan manufaktur lebih banyak melayani pasar nasional daripada pasar-pasar regional.

Model tempat sentral ternyata tidak berhasil menjelaskan timbulnya kecenderungan yang kuat dalam masyarakat mengenai pengelompokan perusahaan-perusahaan karena pertimbangan keuntungan-keuntungan aglomerasi dan ketergantungan.

2.4.2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Sebagaimana diketahui bahwa potensi dan kemampuan masing-masing wilayah berbeda-beda satu sama lainnya, demikian pula masalah pokok yang dihadapinya tidak sama. Sehingga usaha-usaha pembangunan sektoral yang akan dilaksanakan harus disinkronisasikan dengan usaha-usaha pembangunan regional. Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*). Terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep kutub pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dielakkan dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geographic space and space dimension*). Proses pertumbuhan adalah konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dimana industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya.

Nampaknya Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan (Adisasmita, 2005). Hirschman berdalil bahwa pertumbuhan awalnya terbatas pada wilayah-wilayah yang disukai, meskipun kesenjangan menyebar berdasarkan letak geografis, meliputi terpencil dan pertumbuhan ini terjadi melalui dampak hubungan dengan kutub-kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan menyajikan dua fungsi baik fungsi idiologi maupun fungsi politik. Di dalam suatu arti idiologis dan pada suatu tingkat teoritis yang tidak dapat diambil melalui pertanyaan-pertanyaan sosial yang lebih mendalam. Teori kutub pertumbuhan bersandar terhadap mekanisme harga sebagai faktor penengah dan retribusi sumberdaya. Perroux menetapkan bahwa sektor-sektor pertumbuhan didefinisikan dengan hubungan-hubungan ekonomi dengan unit-unit lain di dalam ekonomi. Asumsi Perroux adalah tujuan sosial dari perkembangan wilayah yang dimanfaatkan oleh agen-agen yang ingin memperoleh keuntungan pribadi. Mengikuti pendapat Perroux, Boudeville mendefinisikan kutub pertumbuhan wilayah sebagai seperangkat industri sedang berkembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong lebih lanjut perkembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya (*localized development pole*). Teori Boudeville dapat dianggap sebagai pelengkap terhadap teori tempat sentral yang diformulasikan oleh Christaller dan kemudian diperluas oleh Losch. Boudeville mengemukakan aspek “kutub fungsional” dan memberikan pula perhatian pada aspek geografis (Piche, 1982).

2.4.3. Teori Konvergen (*Convergence Theory*)

Bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Teori Konvergen dapat terjadi jika negara yang bersangkutan telah maju, maka kesenjangan pembangunan regional akan

berkurang (*convergence*). Dari pandangan neo-klasik, kesenjangan wilayah dapat dihubungkan dengan faktor ketidaksempurnaan pasar dan sifat kelambanan proses pembangunan. Menyamaratakan faktor harga antara wilayah dalam suatu wilayah melalui integrasi akan meningkatkan faktor mobilitas sehingga dengan demikian akan ada pencapaian keseimbangan atau pola pertumbuhan wilayah konvergen. Hal tersebut juga ditanggapi rendahnya pendapatan wilayah akan meningkatkan para pekerja melalui migrasi, sehingga menarik investor dengan biaya pekerja yang rendah. Teori konvergen akan terus berlanjut sampai para pekerja dan penghasilan seimbang. Karena wilayah yang produktivitas dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi kedepannya akan lebih sulit menghitung hasil pengurangannya. Akibatnya, untuk dapat menyeimbangkan perekonomian dapat dilakukan jika perekonomian berada pada posisi yang lemah. Teori harga Factor Price Equalization (FPE) sudah menjadi dasar pemikiran yang kuat dalam perdagangan bebas internasional sejak Heckscher berpendapat bahwa pada kondisi tertentu membuka perdagangan yang akan menyamakan hasil- terhadap kesamaan faktor-faktor pada negara-negara lain, dan Ohlin pada awal abad ini, dan disempurnakan oleh Paul Samuelson menyempurnakan secara matematis. Dalam analisa integrasi perekonomian dunia, beberapa ahli seperti Porter dan Krugman mulai melihat pentingnya jarak geografis. Bertil Ohlin membuat asumsi bahwa dua faktor produksi merupakan hal yang penting di setiap negara, yang sebahagian faktor tersebut merupakan hal yang tidak penting pada beberapa negara.

Komoditas bergerak dengan baik di perdagangan internasional, tanpa didukung pajak atau biaya transportasi. Dari pandangannya, perdagangan bebas telah cukup mampu menggantikan mobilitas internasional sehingga pergerakan terhadap perdagangan bebas akan menyebabkan harga pada negara–negara

menjadi sama. Dan jika kedua negara melanjutkan untuk menghasilkan barang-barang pada perdagangan bebas, faktor harganya sebenarnya akan menjadi sama tanpa pergerakan. Kesamaan faktor harga ini (FPE) dibuktikan secara matematis oleh Samuelson. Teori konvergen masih digunakan sebagai model dalam literatur teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa liberalisasi dalam asas dasar dapat meningkatkan proses konvergen melalui wilayah (Hwang, 1996).

2.4.4. Teori Divergen (*Divergence Theory*)

Divergence terjadi pada saat modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga kesenjangan pembangunan regional cenderung melebar. Kesenjangan wilayah yang tinggi menyebabkan pengangguran atau tingkat pendapatan yang cenderung menurun pada sebahagian masyarakat. Untuk mengatasi ini diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang akan mengurangi kesenjangan wilayah (Jeong, 1995). Bila wilayah miskin mampu untuk menaikkan pendapatan per kapita masyarakat secara terus menerus, maka kesenjangan wilayah dapat dipersempit secara perlahan (Dapeng, 1998).

Ada tiga strategi dasar dimana para pembuat kebijakan bisa membantu variasi basis ekonomi wilayah. Masing-masing strategi ini memiliki tingkat risiko berbeda, antara lain:

1. jangkauan industri melibatkan perluasan hubungan ke depan dan ke belakang untuk menambah rangkaian nilai wilayah;
2. pengaruh industri melibatkan kolaborasi industri dengan sektor perindustrian lain di mana ada kemungkinan besar sinergi bisnis

berdasarkan potensi pengembangan wilayah di wilayah yang belum pernah di sentuh (*white space*); serta

3. jangkauan dan pengaruh industri melibatkan kombinasi satu industri atau lebih dalam penambahan nilai dan pengembangan wilayah yang belum pernah disentuh (*white space development*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

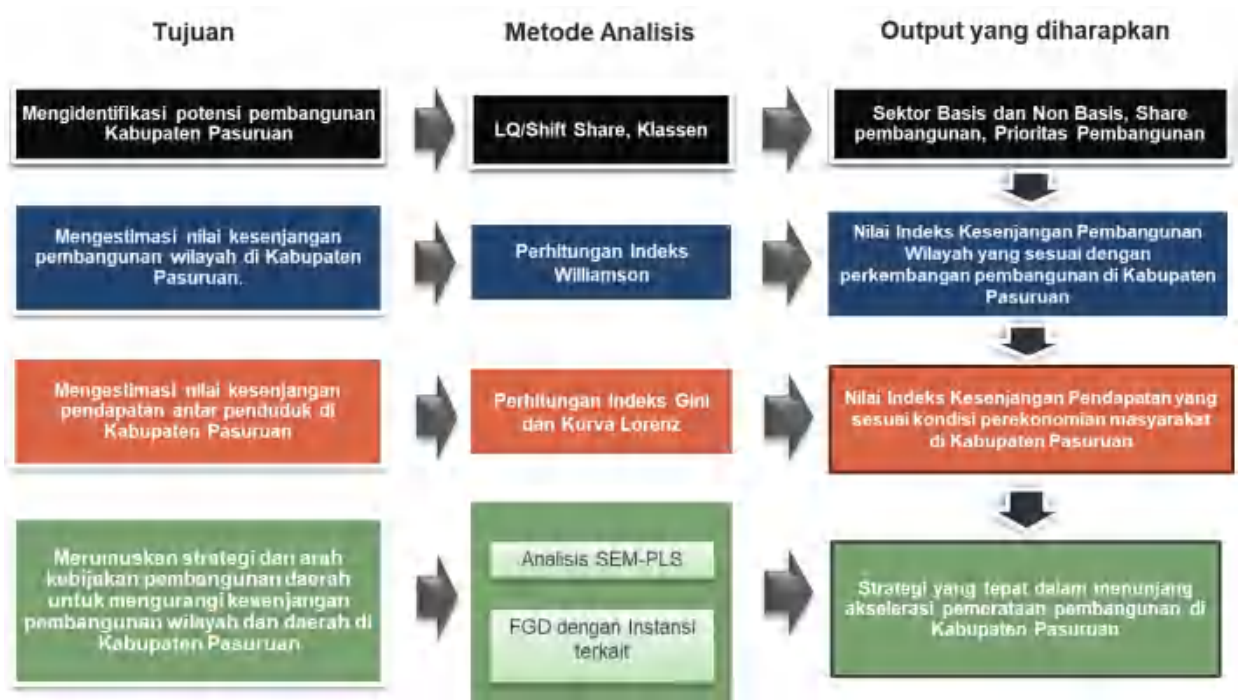
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan kajian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif. Secara umum pendekatan yang digunakan adalah pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS), yaitu pendekatan yang menyentuh seluruh aspek permasalahan dan melibatkan seluruh pihak yang terkait dalam melihat akar permasalahan dan menyusun solusi penyelesaiannya.

Dalam mencapai **tujuan pertama**, pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kuantitatif** dengan menggunakan data sekunder, yaitu data PDRB berdasarkan lapangan usaha Kabupaten Pasuruan. Untuk **tujuan kedua**, pendekatan penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kuantitatif** dengan menggunakan data sekunder, khususnya data-data indikator makro Kabupaten Pasuruan yang berupa data PDRB per kapita per kecamatan dan jumlah penduduk per kecamatan. Selanjutnya, **tujuan ketiga** dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan tujuan pertama, yaitu **pendekatan kuantitatif**, dengan menggunakan data-data pengeluaran makanan dan non makanan per rumah tangga penduduk per kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk mencapai **tujuan keempat**, menggunakan **pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif** untuk mengetahui penyebab kesenjangan pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang berdasarkan penyebab kesenjangan pembangunan tersebut, dirumuskan strategi atau upaya untuk menurunkan kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Dengan penyusunan strategi yang sesuai dengan penyebab permasalahan yang ditemukan langsung di lapang, diharapkan implementasi dari kebijakan pembangunan di Kabupaten Pasuruan akan lebih tepat sasaran dan solutif.

3.2. Diagram Alir Penelitian

Dalam pelaksanaan tahapan penelitian, disusun diagram alir yang dapat menunjukkan langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun diagram alir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dipilih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut: (1) untuk mengidentifikasi potensi pembangunan Kabupaten Pasuruan, menggunakan analisis ekonomi regional; (2) untuk mengestimasi angka kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan, menggunakan analisis Indeks Williamson; (3) untuk mengestimasi angka

kesenjangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menggunakan analisis perhitungan Indeks Gini dan Kurva Lorentz; dan (4) untuk menyusun strategi kebijakan dalam mengatasi kesenjangan di Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan analisis SEM-PLS yang kemudian diolah kembali untuk mengetahui posisi kebijakan yang akan diterapkan dalam kuadran IFAS-EFAS. Adapun output dari keseluruhan hasil analisis data dalam penelitian ini adalah terwujudnya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa data persepsi masyarakat yang diperoleh dari hasil survey primer pada sample masyarakat di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya adalah jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, BPS Jawa Timur, BPS Kabupaten Pasuruan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, dan dinas-dinas terkait lainnya. Untuk mendukung ketersediaan data yang lebih lengkap, sumber data juga diakses melalui publikasi artikel maupun makalah/jurnal ilmiah dari internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti halnya jenis data yang digunakan dalam penelitian, terdapat 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui: (i) survey sekunder pada instansi terkait dengan melakukan interaksi melalui email dan website; serta (ii) survey primer untuk mengetahui secara langsung respon masyarakat Kabupaten

Pasuruan terkait dengan kesenjangan wilayah. Adapun data sekunder utama yang digunakan dalam proses analisis data adalah, (a) data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir; (b) Data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan; (3) data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupten Pasuruan selama lima tahun terakhir; (4) data pengeluaran rumah tangga, baik makanan dan non makanan, penduduk Kabupaten Pasuruan; (5) data program yang sudah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah terkait dengan permasalahan kesenjangan wilayah; serta (6) data-data spasial Kabupaten Pasuruan.

3.5. Data-data yang Dibutuhkan

Dalam melakukan analisis data, dibutuhkan beberapa data-data *time series* dan *cross section* dengan kebutuhan data sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Kebutuhan Data Sekunder dan Sumber Data

No	Kebutuhan Data	Sumber Data
1	RTRW Kabupaten Pasuruan	BAPPELITBANGDA
2	PDRB per kecamatan Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
3	Jumlah penduduk per kecamatan Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
4	Pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga penduduk Kabupaten Pasuruan (2020-2024)	BPS
5	Dokumen Perencanaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Stretagi Penurunan Kesenjangan (RPJMD atau Renstra).	BAPPELITBANGDA

Sumber : Hasil Pemikiran, 2025

3.6. Metode Analisis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan hasil yang ingin dicapai dalam masing-masing tujuan penelitian yang telah ditentukan

pada bagian sebelumnya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka secara terperinci, berikut adalah metode analisis yang digunakan.

3.6.1. Indeks Williamson

Indeks Williamson (IW) adalah ukuran disparitas pendapatan antar daerah yang pertama kali dikembangkan oleh Jeffrey G Williamson. Pada tahun 1965, Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. IW dapat dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antar kab/kota yang terjadi di suatu provinsi (Sjafrizal 2008). Formula Indeks Williamson dapat dituliskan:

$$IW = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (r_i - r)^2}{r^2}$$

di mana r_i menunjukkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku di daerah i , r adalah rata-rata PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku daerah sedangkan x_i jumlah penduduk di daerah i dan n jumlah penduduk daerah keseluruhan.

Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010, bahwa kriteria Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

- a. $IW < 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas rendah;
- b. $IW \geq 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas tinggi.

3.6.2. Koefisien Gini

Koefisien Gini (KG) adalah ukuran disparitas pendapatan penduduk yang pertama kali dikembangkan oleh statistikawan Italia Corrado Gini. KG dinyatakan

dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Secara matematis KG adalah perbandingan luas antara daerah yang terletak di antara garis diagonal dan kurva

Lorenz (ditandai A) dengan luas segitiga (ditandai A dan B) sehingga $KG = \frac{A}{(A+B)}$.

Selanjutnya rumus perhitungan koefisien Gini adalah sebagai berikut.

$$GC = 1 - \sum_{i=1}^n (X_i - X_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$$

Dimana:

GC = Gini Coefficient (Gini Rasio)

X_i = Persentase jumlah penduduk ke-i

Y_i = persentase jumlah pendapatan penduduk kumulatif ke-i

Menurut Permendagri No 54 Tahun 2010, bahwa kriteria dari Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

- a. $KG < 0,3$ terklasifikasi sebagai disparitas rendah;
- b. $0,3 \leq KG \leq 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas sedang;
- c. $KG > 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas tinggi.

3.6.3. Kurva Lorentz

Kurva Lorenz, yaitu suatu kurva yang memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase kumulatif pendapatan dengan persentase kumulatif populasi penduduk selama waktu tertentu. Bentuk kurva Lorenz menunjukkan derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal 45° atau garis pemerataan, maka semakin merata distribusi pendapatan (Perkin et al. 2001).

Fungsi Lorenz didefinisikan sebagai fungsi $L: [0,1] \rightarrow \mathcal{R}$ dengan $y =$ pendapatan setiap penduduk, $z =$ quantil pendapatan, $F(z) =$ proporsi penduduk dengan pendapatan $y \leq z$, $f(z) = F'(z)$ adalah fungsi kepekatan peluang, $f(y)dy \cong$ proporsi penduduk dengan pendapatan pada interval $[y, y + dy]$, dan $\bar{y} = \int_0^{\infty} y f(y) dy$ adalah rata-rata pendapatan. Sehingga Fungsi Lorenz didefinisikan sebagai berikut (Groth, 2008):

$$F = F(z) \Rightarrow L(F) = \frac{\int_0^z F(x) dx}{\bar{y}}$$

3.6.4. Analisis SEM PLS (*Structural Equation Modeling – Partial Least Squares*)

Untuk mengetahui penyebab kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (SEM-PLS). Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan kausal yang kompleks antara variabel laten (konstrak) yang terdiri atas beberapa indikator terukur. SEM-PLS juga sesuai digunakan pada penelitian eksploratif dengan ukuran sampel relatif kecil dan data yang tidak berdistribusi normal.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi terhadap kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan, serta mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi disparitas antar kecamatan. Adapun variable dependen (konstruk endogen) dalam penelitian ini adalah Kesenjangan Wilayah (X_3) yang diukur melalui indikator dukungan pemerintah, dan variabel laten (konstruk eksogen) yang terdiri dari variable berikut:

Tabel 3. 2 Variabel Eksogen dalam Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan

No	Variabel	Sub Variabel
1	Keterisolasian Geografis (X_1)	Keterisolasian Geografis ($X_{1.1}$)
		Potensi Alam Desa/Kel ($X_{1.2}$)
		Jenis Guna Lahan ($X_{1.3}$)
		Akses Menuju Sarana Kesehatan ($X_{1.4}$)
		Akses Menuju Sarana Pendidikan ($X_{1.5}$)
		Akses Birokrasi ($X_{1.6}$)
		Akses Air Bersih ($X_{1.7}$)
		Akses Informasi ($X_{1.8}$)
		Akses Pasar ($X_{1.9}$)
		Jalan ($X_{1.10}$)
		Air Bersih ($X_{1.11}$)
2	Sumberdaya Ekonomi (X_2)	Jumlah Penduduk Usia Produktif ($X_{2.1}$)
		Jumlah Pengangguran ($X_{2.2}$)
		Tingkat Pendidikan ($X_{2.3}$)
		Skill ($X_{2.4}$)
		Penggunaan Teknologi Modern ($X_{2.5}$)
		Inovasi ($X_{2.6}$)
		Jaringan Pemasaran ($X_{2.7}$)
		Informasi Pasar ($X_{2.8}$)
		Kemitraan dengan Pihak Lain ($X_{2.9}$)
3	Implementasi Program (X_4)	Kondisi Fisik Kesehatan ($X_{4.1}$)
		Kondisi Non Fisik Kesehatan ($X_{4.2}$)
		Kondisi Fisik Pendidikan ($X_{4.3}$)
		Kondisi Non Fisik Pendidikan ($X_{4.4}$)

Sumber: Penelitian Terdahulu.

Selanjutnya, tahapan penelitian yang dilakukan dalam analisis SEM-PLS adalah sebagai berikut.

a. Langkah 1: Spesifikasi Model

- Menetapkan *measurement model (outer model)* yang menghubungkan indikator-indikator teramati dengan konstruk laten (faktor dan variabel).
- Menetapkan *structural model (inner model)* yang menunjukkan hubungan kausal antar konstruk laten dengan fokus pada penjelasan terhadap kesenjangan wilayah.

- b. Langkah 2: Persiapan Data
- Memeriksa kualitas data: validitas, reliabilitas, normalitas, serta keberadaan *missing values*.
 - Melakukan *exploratory factor analysis* bila diperlukan.
- c. Langkah 3: Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
- Menilai *convergent validity* dengan kriteria **Average Variance Extracted (AVE) > 0,5**.
 - Menilai *composite reliability* > 0,7.
 - Menilai *discriminant validity* menggunakan kriteria **Fornell-Larcker** atau **HTMT ratio**.
- d. Langkah 4: Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
- Menganalisis *path coefficients* (arah dan kekuatan hubungan antar variabel).
 - Mengevaluasi **R-squared** (variasi yang dijelaskan) untuk konstruk endogen.
 - Melakukan analisis *predictive relevance (Q-squared)* dan *effect size (f²)*.
 - Menggunakan **bootstrapping** (misal 5.000 subsampel) untuk menguji signifikansi statistik (nilai *t* dan *p*).
- e. Langkah 5: Penyempurnaan Model
- Berdasarkan hasil analisis, model dapat disesuaikan kembali (misalnya dengan menghapus indikator yang lemah).
 - Melakukan validasi ulang untuk memastikan keandalan model akhir.

f. Langkah 6: Interpretasi dan Pelaporan

- Menginterpretasikan jalur hubungan signifikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama penyebab kesenjangan wilayah.
- Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari faktor sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.
- Menyusun rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Metode **SEM-PLS** memungkinkan analisis secara komprehensif terhadap faktor-faktor multidimensi yang memengaruhi kesenjangan wilayah, dengan memanfaatkan struktur variabel yang telah dirancang secara rinci.

3.6.5. Analisis Deskriptif Interpretatif

Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan segenap fakta atau karakteristik dari populasi tertentu secara sistematis, aktual, dan cermat (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, metode deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan serta menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis faktor.

3.6.6. Analisis IFAS-EFAS

Metode ini merupakan salah satu metode analisis *development* yang bersifat kuantitatif dalam artian bahwa keempat faktor SWOT masing-masing dianalisis berdasarkan komponen dari tiap faktor untuk selanjutnya diberikan penilaian untuk mengetahui posisi obyek penelitian pada kuadran SWOT. Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk tabel kepada dua

kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/ *Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/ *External Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*).

1) **Tabel IFAS**

Cara-cara penyusunan tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) adalah sebagai berikut:

- Kolom I disusun 5-10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan
- Tiap faktor dalam kolom II diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh tersebut terhadap perkembangan desa tertinggal. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata variabel lain. Jika kelemahan tiap variabel di desa tertinggal besar sekali dibandingkan dengan rata-rata variabel lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika kelemahannya dibawah rata-rata, nilainya adalah 1.
- Penentuan rating dalam tabel IFAS, dapat menggunakan hasil dari analisis faktor yang menggunakan metode *Principal Component Analysis*. Berdasarkan pengertiannya, penentuan rating dapat menggunakan *Eigen Values/Characteristic Roots* yang menunjukkan hasil pengukuran keragaman seluruh variabel yang digunakan. Jika terdapat faktor yang memiliki *eigen value* rendah, maka faktor tersebut hanya memberikan sedikit

sekali sumbangan dalam menjelaskan keragaman variabel dan dapat diabaikan sebagai suatu kelebihan dari faktor-faktor yang lebih penting. *Eigen values* mengukur jumlah keragaman dalam keseluruhan sampel yang diuraikan oleh setiap faktor (www.en.wikipedia.org). *Eigen values* yang dihasilkan dalam analisis faktor kemudian diintervalkan untuk mendapatkan nilai rating yang sesuai.

- Penentuan nilai bobot juga dapat dilakukan dengan menggunakan hasil analisis faktor yaitu *component scores*. *Component scores* merupakan nilai dari setiap variabel dalam masing-masing faktor. Untuk memperhitungkan nilai faktor untuk suatu variabel dalam suatu faktor, digunakan nilai baku dari masing-masing variabel, yaitu hasil pengkuadratan dari masing-masing nilai variabel dalam masing-masing faktor, yang kemudian dijumlahkan untuk masing-masing variabelnya (www.en.wikipedia.org). Nilai faktor tersebut yang digunakan sebagai nilai bobot dalam tabel IFAS.
- Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan
- Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan

2) **Tabel EFAS**

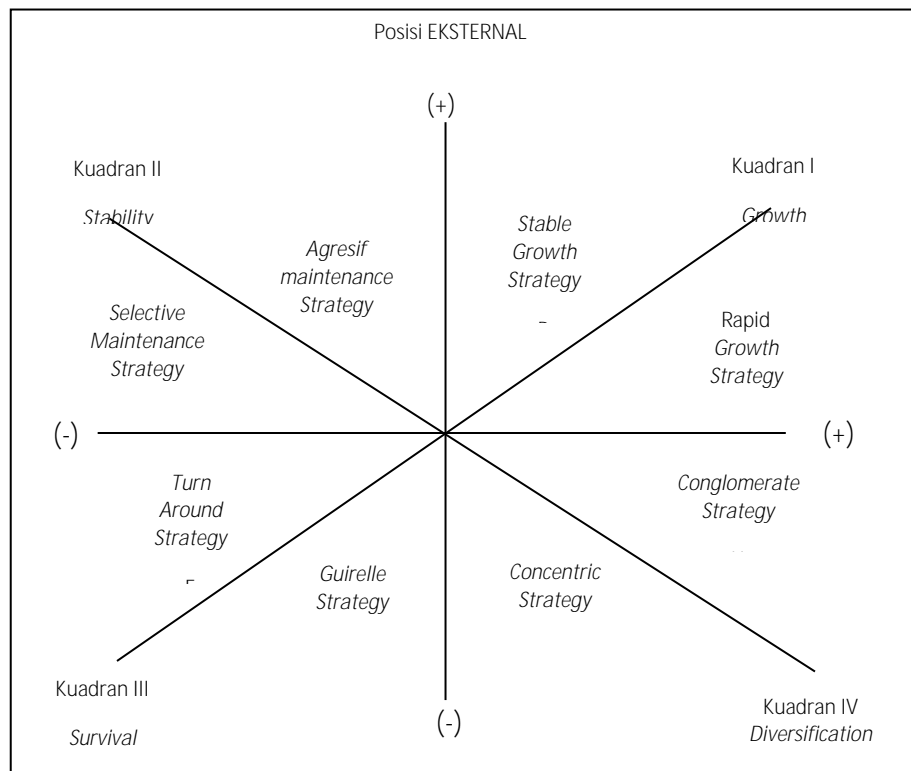
Cara-cara penyusunan tabel EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah sebagai berikut:

- Kolom I disusun 5-10 faktor-faktor peluang dan ancaman
- Tiap faktor dalam kolom II diberi faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
- Rating dihitung untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh tersebut

terhadap perkembangan desa tertinggal. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) diberi nilai mulai dari +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkannya dengan rata-rata sektor ekonomi atau variabel lain. Jika ancaman variabel desa tertinggal besar sekali dibandingkan dengan rata-rata variabel lainnya, nilainya adalah 4, sedangkan jika ancamannya dibawah rata-rata, nilainya adalah 1.

- Sama halnya dengan penentuan rating dalam tabel IFAS, penentuan rating dalam tabel EFAS dapat menggunakan *Eigen values* yang dihasilkan dalam analisis faktor, yang kemudian diintervalkan untuk mendapatkan nilai rating yang sesuai.
- Penentuan nilai bobot juga dapat dilakukan dengan menggunakan hasil analisis faktor yaitu dengan hasil pengkuadratan dari masing-masing nilai variabel dalam masing-masing faktor, yang kemudian dijumlahkan untuk masing-masing variabelnya. Nilai faktor tersebut yang digunakan sebagai nilai bobot dalam tabel EFAS.
- Bobot dikalikan dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan
- Skor pembobotan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pembobotan

Adapun untuk lebih jelasnya, kuadran dalam analisis IFAS EFAS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Diagram IFAS-EFAS

Adapun sistem penilaian yang dilakukan adalah memberikan penilaian dalam bentuk matrik kepada dua kelompok besar yaitu faktor internal (IFAS/ *Internal Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal (EFAS/ *External Factor Analysis Summary*) yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threaten*). Dari penilaian berdasarkan IFAS dan EFAS diketahui posisi obyek penelitian dalam koordinat pada sumbu x dan y, sehingga diketahui posisinya sebagai berikut (Yoeti, 1996):

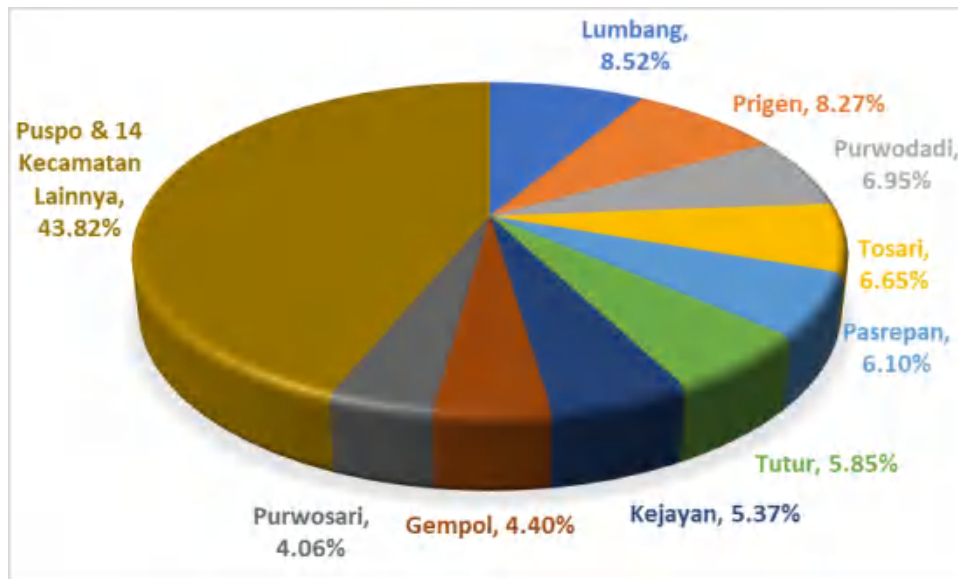
1. Kuadran I (*Growth*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang, yaitu:
 - a. Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy*, yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

4.1. Aspek Geografis

Kabupaten Pasuruan memiliki wilayah yang cukup luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dapat diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474,02 km² atau 3,08% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan yang terbagi atas 24 kelurahan dan 341 desa. Adapun proporsi luas wilayah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

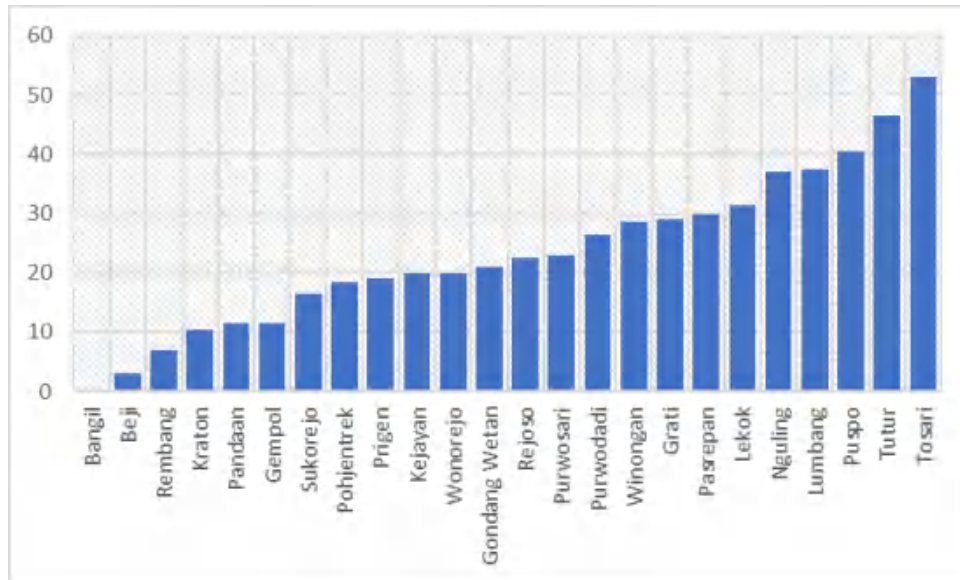


Sumber: BPS, 2025

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Lumbang, dengan proporsi sebesar 8,52% dari total luas wilayah Kabupaten Pasuruan (125,55 km²). Wilayah kecamatan yang terluas selanjutnya adalah Kecamatan Prigen (121,9 km²), Kecamatan Purwodadi (102,46 km²), Tosari (98

km²), Pasrepan (89,95 km²), Tutur (86,3 km²), Kejayan (79,15 km²), Gempol (64,92 km²), dan Purwosari (59,87 km²).



Sumber: BPS, 2025

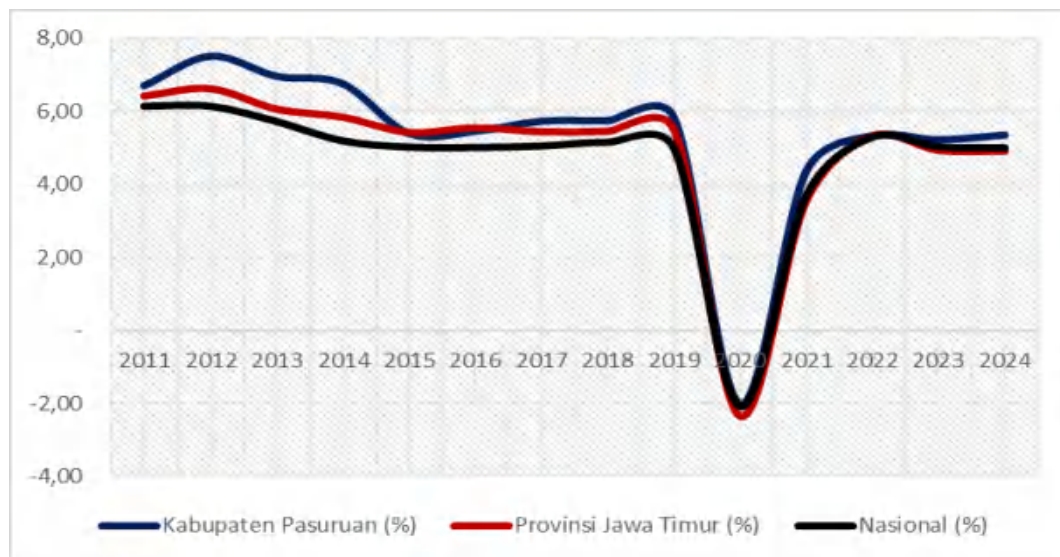
Gambar 4.2 Jarak Wilayah Kecamatan ke Pusat Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pusat wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Kecamatan Bangil. Hal tersebut mengingat Kecamatan Bangil merupakan wilayah kecamatan dengan fasilitas ekonomi dan sosial yang terlengkap jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan wilayah kecamatan yang terjauh dari pusat wilayah Kabupaten Pasuruan adalah wilayah Kecamatan Tosari dengan jarak sejauh 53 km dari pusat wilayah Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Tosari merupakan kecamatan dengan jenis topografi pegunungan yang memiliki ketinggian wilayah lebih dari 1.000 mdpl.

4.2. Aspek Perekonomian.

4.2.1. Perkembangan Makro Ekonomi Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Hal tersebut nampak berdasarkan trend laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang hampir selalu berada di atas laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

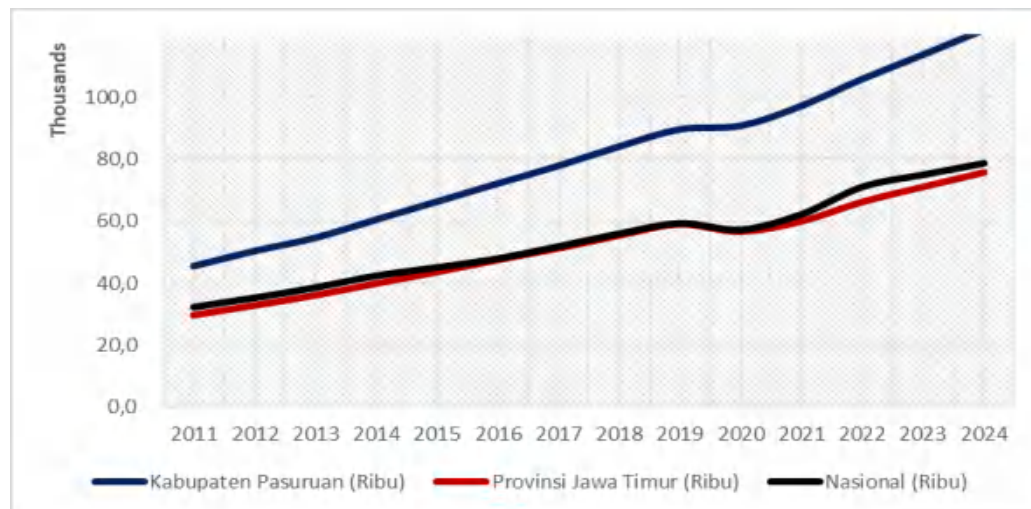


Sumber: BPS, 2025 (diolah)

Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024

Kabupaten Pasuruan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 6.69%. Angka tersebut mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun hingga angka 5,38% pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami sedikit peningkatan hingga menjadi angka 5.83%. Pada tahun 2020, sama halnya dengan yang terjadi di seluruh wilayah di dunia, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga menjadi -2.03%, namun masih tetap berada di atas Tingkat pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berangsur pulih dan kembali mengalami peningkatan hingga 5.32% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 5.21% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup baik, hingga di angka 5,34%, berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional yang sama-sama mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut mengindikasikan **Kabupaten Pasuruan telah berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerahnya (hingga 0,13% jika dibandingkan tahun 2023), lebih cepat dari beberapa wilayah lain yang bahkan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi daerah.**



Sumber: BPS, 2025 (diolah)

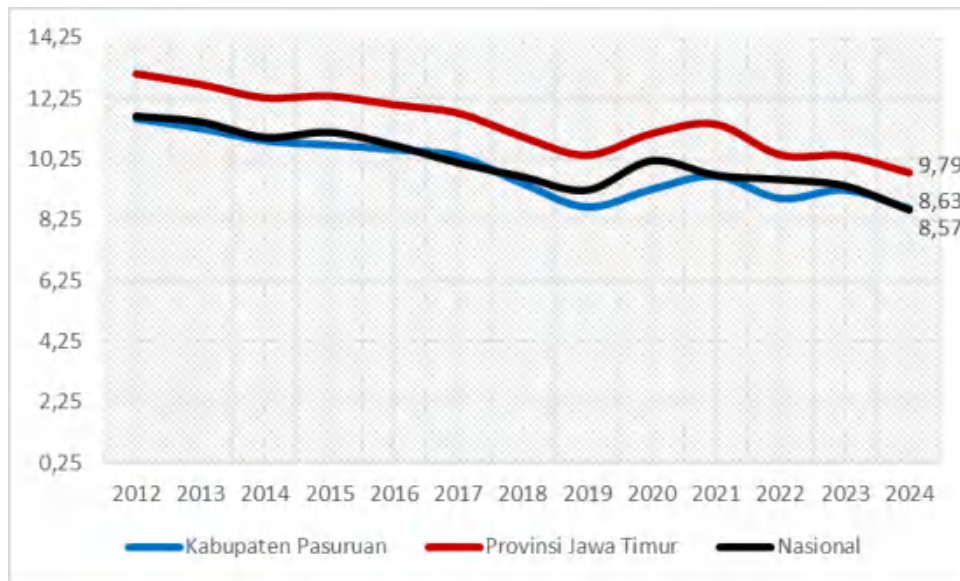
Gambar 4.4 Perkembangan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2011 – 2024

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dikemukakan berdasarkan data BPS yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan selalu berada di atas nilai PDRB per

kapita Jawa Timur dan Nasional. Pada tahun 2010, nilai PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 40,342 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan hingga menjadi 89,580 juta rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 angka tersebut tetap mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya (yaitu sebesar 1,3%). Pada tahun selanjutnya hingga tahun 2023, angka pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan kembali mengalami peningkatan yang cukup besar hingga menjadi 113,682 juta rupiah, atau sebesar 159.84% jika dibandingkan dengan nilai PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2024, pendapatan per kapita Kabupaten Pasuruan kembali mengalami peningkatan yang cukup besar hingga menjadi 121,689 juta rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jawa Timur (75,77 juta rupiah) dan Nasional (78,617 juta rupiah) Artinya, **Kabupaten Pasuruan memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingkat produktivitas serta daya beli masyarakat yang tinggi.**

4.2.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Selain dari angka pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapitanya, kondisi makro ekonomi Kabupaten Pasuruan juga dapat dilihat berdasarkan angka kemiskinan, seperti yang tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2025

Gambar 4.5. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2012-2024

Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan memiliki kecenderungan yang menurun, dan tetap selalu berada di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan data perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2019 (dari 11,58% menjadi 8,68%). Pada tahun 2019 hingga 2020, angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan hingga menjadi 9,7%, dimana hal tersebut memang terjadi di seluruh wilayah Indonesia mengingat terjadinya pandemi. Namun pada tahun berikutnya, angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan berhasil kembali mengalami penurunan (menjadi 8,96% pada tahun 2022), dan kembali menurun menjadi 8,63 pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di daerah lain di Provinsi Jawa Timur.

BAB V

INDEKS KESENJANGAN WILAYAH DI KABUPATEN PASURUAN

5.1. Potensi Pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, **industri pengolahan tetap selalu menjadi sektor primadona di Kabupaten Pasuruan.** Namun, **dalam situasi perekonomian global yang tidak menentu, daerah tidak dapat hanya bergantung pada sektor industri pengolahan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.** Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor industri pengolahan berpotensi untuk menimbulkan kerentanan struktural, terutama karena industri pengolahan sangat bergantung pada stabilitas rantai pasok global, ketersediaan bahan baku, serta permintaan ekspor. Ketidakstabilan kondisi ekonomi dunia dapat secara langsung menekan kinerja industri pengolahan dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, sektor industri pengolahan, khususnya industri besar, memiliki ketergantungan yang kuat terhadap investasi besar dan teknologi tinggi, yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Dalam kondisi tersebut, potensi terjadinya penundaan investasi dan penurunan produksi menjadi lebih tinggi, sehingga berisiko terhadap penyerapan tenaga kerja dan keberlanjutan pendapatan daerah. **Ketergantungan tersebut juga dapat menimbulkan ketimpangan struktural, mengingat manfaat pertumbuhan ekonomi menjadi terkonsentrasi di kawasan industri tertentu dan tidak menyebar merata ke seluruh wilayah.** Oleh sebab itu, sangat perlu untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi serta potensi

pembangunan dari sektor lain di Kabupaten Pasuruan melalui analisis ekonomi regional sebagai berikut.

5.1.1. Analisis Tipologi Klassen.

Dalam analisis ekonomi regional, analisis tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi pembentuk variabel regional daerah, dengan cara memperbandingkan kontribusi dan laju pertumbuhan sektor ekonomi suatu daerah dengan daerah di tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat diidentifikasi sektor unggulan dari Kabupaten Pasuruan. Adapun kuadran hasil analisis tipologi Klassen Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Tipologi Klassen, 2024

<p style="text-align: center;">Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh pesat (Developed Sector)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industri Pengolahan. • Pengadaan Listrik dan Gas. 	<p style="text-align: center;">Kuadran II Sektor maju tetapi tertekan (Stagnant Sector)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi
<p style="text-align: center;">Kuadran III Sektor potensial (Developing Sector)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. • Pertambangan dan Pengalihan. • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Transportasi dan Pergudangan • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Informasi dan Komunikasi • Jasa Keuangan dan Asuransi • Real Estate • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya 	<p style="text-align: center;">Kuadran IV Sektor Relatif tertinggal (Underdeveloped Sector)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Perusahaan • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: Hasil analisis data, 2025

Sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam klasifikasi sektor ekonomi potensial. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan hasil analisis Klassen yang menunjukkan bahwa terdapat, (i) **2 (dua) sektor ekonomi** yang

termasuk dalam klasifikasi sektor **unggul** (maju dan tumbuh pesat) karena memiliki kontribusi yang sangat besar dengan laju pertumbuhan yang sangat besar pula, bahkan hingga outlier, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor pengadaan listrik dan gas; (ii) **1 (satu) sektor potensial unggul** (maju tapi tertekan) karena memiliki kontribusi yang sangat besar namun laju pertumbuhannya cukup rendah, yaitu sektor konstruksi; (iii) **10 (sepuluh) sektor potensial berkembang** karena memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat namun kontribusinya masih rendah, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, sektor jasa pendidikan, serta sektor jasa lainnya; dan yang terakhir (iv) **4 (empat) sektor tertinggal** karena memiliki kontribusi dan laju pertumbuhan yang rendah, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor industri pengolahan tetap selalu menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan dari tahun ke tahun. Adapun pergeseran posisi struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Pasuruan, 2020 - 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
B. Pertambangan dan Penggalian					
C. Industri Pengolahan					
D. Pengadaan Listrik dan Gas					
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F. Konstruksi					
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan					
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
J. Informasi dan Komunikasi					
K. Jasa Keuangan dan Asuransi					
L. Real Estate					
M,N. Jasa Perusahaan					
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P. Jasa Pendidikan					
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial					
R,S,T,U. Jasa Lainnya					

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025

Keterangan:

	Sektor Maju (Unggul)		Sektor Potensial Berkembang
	Sektor Potensial		Sektor Relatif Tertinggal

Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, **tidak** terdapat banyak pergeseran, khususnya sektor ekonomi yang berada pada sektor maju (unggul) dan sektor potensial unggul. Industri pengolahan hampir selalu menjadi sektor unggulan dari tahun ke tahun yang kontribusi dan laju pertumbuhannya selalu berada pada posisi yang outlier (jauh berada di atas sektor perekonomian lain di Kabupaten Pasuruan). Namun pada **tahun 2022**, **sektor industri pengolahan sempat mengalami perlambatan** laju pertumbuhan

dibandingkan dengan kinerja sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pasuruan memiliki angka laju pertumbuhan sebesar 5,41%, sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki angka laju pertumbuhan sebesar 6,24%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi dinamika struktural dan eksternal yang memengaruhi sektor industri secara lokal di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. **Salah satu faktor utama yang mendorong perlambatan tersebut adalah efek basis tinggi dari tahun sebelumnya.** Pada tahun 2021, sektor industri pengolahan di Kabupaten Pasuruan tumbuh cukup signifikan sebagai bagian dari proses rebound pasca krisis pandemi COVID-19. Pertumbuhan tinggi di tahun tersebut menjadi acuan pembandingan (*base year*) yang menyebabkan pertumbuhan tahun 2022 secara persentase terlihat melambat, meskipun volume output industri secara absolut tetap tinggi. Pada tahun 2019, Industri pengolahan menjadi satu-satunya sektor unggul di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan sektor ekonomi lainnya tersebar cukup banyak dan hampir seimbang di sektor potensial unggul dan sektor tidak unggul. Pada tahun 2020, terdapat 2 (dua) sektor tambahan pada kuadran sektor unggul selain sektor Industri Pengolahan, yaitu sektor konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan sektor lainnya hampir seluruhnya berkumpul pada kuadran sektor potensial unggul, dan hanya sektor pertambangan dan penggalian yang termasuk dalam sektor tidak unggul. Pada tahun 2021, kuadran sektor unggulan Kabupaten Pasuruan hanya diisi oleh sektor industri pengolahan saja. Sedangkan sektor ekonomi lain kembali terbagi hampir merata pada sektor potensial unggul dan sektor tertinggal (hampir sama halnya dengan tahun 2019). Pada tahun 2022, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor bergeser dari sektor potensial berkembang menjadi sektor unggulan, bersama dengan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2023, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu

bertahan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan, dan diikuti oleh sektor konstruksi yang juga bergeser dari sektor potensial berkembang menjadi sektor unggulan. Sehingga pada tahun 2023, terdapat 3 (tiga) sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi. Kemudian pada tahun 2024, terjadi sedikit pergeseran kembali, dimana sektor konstruksi mengalami sedikit perlambatan hingga menjadi sektor potensial berkembang, sedangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan kontribusi dan percepatan laju pertumbuhan sehingga mampu menjadi sektor unggulan. Selain kedua sektor tersebut, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tetap bertahan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan.

5.1.2. Analisis *Location Quotient* (LQ).

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient*, dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan dengan melihat apakah sektor tersebut menjadi basis/konsentrasi aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Adapun hasil analisis LQ Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 3. *Location Quotient* Sektor Ekonomi Kabupaten Pasuruan, 2015-2024

LU	LQ									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,53	0,52	0,51	0,51
Pertambangan dan Penggalian	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11
Industri Pengolahan	1,96	1,99	1,98	1,96	1,95	1,98	2,00	1,99	2,00	1,99
Pengadaan Listrik dan Gas	2,77	2,77	2,73	2,69	2,65	2,59	2,54	2,56	2,65	2,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,37
Konstruksi	1,36	1,32	1,31	1,29	1,28	1,25	1,21	1,20	1,19	1,17
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52
Transportasi dan Pergudangan	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,23	0,22	0,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,62	0,61	0,62	0,62	0,62
Informasi dan Komunikasi	0,57	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Real Estate	0,43	0,43	0,43	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Jasa Perusahaan	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,48	0,47	0,46	0,47	0,46
Jasa Pendidikan	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24
Jasa lainnya	0,73	0,74	0,73	0,73	0,72	0,71	0,69	0,68	0,68	0,68
PDRB	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Hasil pengolahan data, 2025

Kabupaten Pasuruan memiliki **3 (tiga) sektor ekonomi basis**. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) yang menunjukkan bahwa pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ yang terbesar yaitu 2,70. Artinya, **sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor ekonomi basis**, dimana aktivitas sektor tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang paling banyak menjadi input industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pasuruan, dan juga merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan. Nilai LQ sektor ini selalu menjadi yang tertinggi secara keseluruhan. Hal tersebut menandakan **peran strategis Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah yang melayani kebutuhan energi kawasan sekitar**. Meskipun sempat menurun pada 2012–2014, tren meningkat kembali setelah 2015 menunjukkan adanya ekspansi infrastruktur energi.

Sektor kedua, adalah sektor industri pengolahan dengan nilai 1,99. **Sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi sektor basis utama Kabupaten Pasuruan** dengan nilai LQ tertinggi kedua setelah sektor energi. Kestabilan LQ di atas 1,9 sepanjang 2010–2024 menunjukkan **keunggulan kompetitif yang kuat**, baik dari sisi produktivitas maupun kapasitas ekspor antarwilayah. Untuk itu, pemerintah daerah **perlu mempertahankan daya saing sektor ini melalui peningkatan efisiensi produksi, digitalisasi industri, penguatan sumber daya manusia industri, serta dukungan terhadap riset dan inovasi industri kecil dan menengah agar mampu bertahan di tengah fluktuasi global**.

Sektor ketiga adalah sektor konstruksi dengan nilai 1,17, meskipun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan dari 1,42 (2011) menjadi 1,17 (2024) mengindikasikan perlambatan dalam aktivitas pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat program pembangunan infrastruktur strategis dan

mendorong keterlibatan sektor swasta dalam proyek konstruksi publik melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) agar kontribusi sektor ini kembali meningkat.

Selain ketiga sektor ekonomi tersebut, ke-14 sektor lainnya termasuk dalam sektor non basis. Namun untuk sektor keempat yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, meskipun selalu di bawah angka 1, nilai LQ sektor pertanian relatif stabil. Artinya, untuk saat ini, **aktivitas pertanian lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan lokal**. Namun, **meski bukan sektor basis, sektor ini penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat**. Pemerintah daerah perlu **memperkuat pertanian berkelanjutan, meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, dan mendorong agroindustri sebagai sektor pendukung industri pengolahan**.

5.1.3. Analisis *Shift Share*.

Setelah mengetahui sektor basis di Kabupaten Pasuruan, maka selanjutnya dilakukan analisis *Shift Share* yang digunakan sebagai pengkajian atas pergeseran struktur perekonomian yang terjadi selama ini dengan memperhatikan struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur. Adapun runtutan dari analisis *Shift Share* untuk Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: (i) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasuruan jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur, dan (ii) menghitung pergeseran (perubahan) struktur ekonomi di Kabupaten Pasuruan menggunakan *Shift Share*.

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share*, dapat diketahui bahwa **Kabupaten Pasuruan selama 2010 hingga 2024 telah mengalami perubahan struktural yang cukup baik (berkembang)**. Nilai PDRB pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6.370,27 (dalam Milyar) jika dibandingkan dengan tahun 2023. Komponen tersebut perkembangannya dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan tingkat provinsi, bauran beberapa sektor (17 lapangan usaha), dan keunggulan kompetitif di Kabupaten Pasuruan terhadap Provinsi Jawa Timur. Adapun hasil analisis shift share di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Hasil Analisis *Shift Share* Kabupaten Pasuruan, 2011-2024

LU	Shift Share (D _{ij})													
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	229,11	259,73	127,56	187,43	174,14	191,98	63,40	- 88,85	47,84	63,39	- 146,69	23,55	84,62	42,59
Pertambangan dan Penggalian	12,62	4,16	7,48	7,38	7,50	9,55	19,06	12,21	6,38	- 38,42	2,90	20,15	20,01	16,65
Industri Pengolahan	2.336,75	3.106,22	2.867,51	3.462,93	2.979,86	2.850,58	2.953,68	3.627,20	3.773,09	- 200,77	3.264,06	3.522,17	3.423,65	3.941,12
Pengadaan Listrik dan Gas	- 41,59	- 89,12	14,90	42,11	47,23	2,86	11,23	- 28,42	1,30	- 31,73	33,29	63,74	240,67	100,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,70	0,69	1,03	0,38	0,72	2,01	2,01	1,39	1,90	1,53	2,01	0,42	2,08	2,85
Konstruksi	555,83	603,60	773,43	519,74	119,89	208,00	689,52	598,77	617,61	- 619,01	37,65	583,06	571,40	674,32
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	478,99	434,91	421,58	313,37	425,17	587,97	642,42	579,68	606,06	- 1.003,58	883,93	741,05	653,85	541,28
Transportasi dan Pergudangan	19,01	28,48	37,84	41,65	39,52	33,40	38,17	40,64	46,14	- 30,58	40,21	96,18	80,58	86,45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	153,35	139,44	141,09	220,10	212,10	245,11	282,51	252,55	246,11	- 477,76	70,17	352,10	326,18	283,97
Informasi dan Komunikasi	160,52	236,14	261,44	107,60	112,39	224,58	245,10	210,35	235,87	332,59	244,88	179,54	300,68	363,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	47,03	57,68	88,79	33,32	37,90	44,35	21,95	25,31	25,35	1,64	7,63	9,33	28,14	37,54
Real Estate	38,90	35,04	38,03	36,92	25,58	43,65	24,69	31,49	40,00	21,41	9,85	33,19	26,77	27,84
Jasa Perusahaan	2,49	1,85	5,41	6,72	4,38	5,77	4,35	6,17	5,97	- 7,05	1,68	2,65	6,75	6,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	41,12	11,44	4,76	3,80	48,72	46,92	22,10	43,33	37,45	- 26,10	- 11,23	- 19,60	8,93	79,77
Jasa Pendidikan	29,04	42,21	44,95	33,02	35,10	35,39	24,66	26,60	44,18	12,59	- 1,22	- 7,05	22,46	40,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,42	9,89	8,92	10,28	7,80	9,63	7,59	8,95	10,28	21,17	8,19	8,63	8,12	11,49
Jasa lainnya	13,93	13,16	32,17	34,66	32,33	53,72	38,37	39,99	54,29	- 155,71	30,17	112,69	95,59	113,60
PDRB	4.093,23	4.895,50	4.876,90	5.061,40	4.310,35	4.595,46	5.090,80	5.387,38	5.799,82	- 2.136,38	4.477,47	5.721,81	5.900,47	6.370,27

Sumber : Hasil Analisis Data, 2025

Analisis *shift share* digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja sektor-sektor lapangan usaha (LU) di Kabupaten Pasuruan dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik karena pengaruh nasional (*national share*), struktur industri (*industry mix*), maupun keunggulan kompetitif lokal (*differential shift / Du*). Fokus analisis ini tertuju pada komponen *shift differential* (Du) yang menggambarkan keunggulan lokal relatif terhadap provinsi atau nasional. **Sektor industri pengolahan memiliki keunggulan kompetitif yang konsisten.** Sektor industri pengolahan menunjukkan nilai Du yang konsisten tinggi, terutama pada tahun-tahun pasca-2016. Lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2021 (Du = 3.522,17) dan tetap tinggi di 2022 (Du = 3.429,87), mencerminkan keunggulan struktural dan kemampuan bertahan sektor ini terhadap krisis. Walau terjadi perlambatan di 2023 dan 2024, nilainya tetap kuat (Du = 2.942,63 dan 3.141,12), menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan masih menjadi basis utama pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Timur. Untuk itu, dukungan terhadap inovasi industri, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan infrastruktur untuk menjaga pertumbuhan dan daya saing global perlu tetap dilakukan.

Selanjutnya **sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh dengan berbasis pada lokasi yang strategis.** Sektor ini mengalami Du positif signifikan terutama sejak 2021 (Du = 40,21) dan terus meningkat hingga 2024 (Du = 58,85). Hal ini menunjukkan meningkatnya aktivitas logistik dan distribusi, sejalan dengan peran Kabupaten Pasuruan sebagai koridor industri dan akses pelabuhan. Ini

Berikutnya, **sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pemulihan dan potensi wisata.** Sektor ini mulai menunjukkan Du positif pasca-pandemi, khususnya tahun 2021 (Du = 70,17) dan 2022 (Du = 352,32). Pertumbuhan ini menunjukkan potensi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal.

Walaupun sempat menurun pada 2023, sektor ini kembali naik pada 2024 (Du = 240,38), menandakan arah pertumbuhan yang perlu terus didorong.

Sektor perdagangan dan reparasi yang mulai stabil dan perlu mendapatkan dorongan. Sektor perdagangan dan reparasi kendaraan mencatat Du tinggi pada tahun 2018 dan 2019, tetapi mengalami pelemahan saat pandemi (Du = -1.003,58 pada 2020) dan belum sepenuhnya pulih (Du 2024 = 541,28). Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan dinamika konsumsi lokal perlu terus diperkuat untuk memulihkan kinerja sektor ini.

Sektor konstruksi masih cukup fluktuatif sehingga perlu sinergi investasi. Sektor konstruksi mencatat Du positif namun menurun dari puncaknya di 2018–2019 ke nilai lebih rendah di 2022 dan 2023. Penurunan ini mengindikasikan perlambatan proyek infrastruktur atau investasi fisik, baik publik maupun swasta. Kemudian sektor tersier lain (pendidikan, kesehatan, jasa sosial) yang cukup stabil namun tidak dominan. Beberapa sektor jasa sosial seperti pendidikan dan kesehatan mencatat Du kecil namun relatif stabil. Meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan tidak dominan, sektor ini penting untuk pembangunan kualitas SDM dan ketahanan sosial.

Perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja sektoral yang beragam, dengan **sektor industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta perdagangan menampilkan keunggulan shift-share yang kuat.** Upaya kebijakan perlu difokuskan pada pemeliharaan keunggulan kompetitif, penanganan kerentanan sektoral, serta penguatan inovasi dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis sektoral yang mendalam sepanjang periode 2011–2024 ini memberikan dasar penting bagi perumusan kebijakan ekonomi daerah yang lebih terarah, sejalan dengan dinamika dan potensi pertumbuhan masing-masing sektor di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil analisis regional, dapat dikemukakan bahwa **strategi pembangunan daerah harus diarahkan pada diversifikasi ekonomi. Penguatan sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan, pariwisata domestik, ekonomi kreatif, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan tahan terhadap guncangan eksternal.** Sektor-sektor tersebut memiliki karakteristik berbasis sumber daya dan pasar lokal, sehingga lebih stabil di tengah fluktuasi ekonomi global. Selain meningkatkan stabilitas ekonomi, diversifikasi juga mendorong inklusivitas dan pemerataan pembangunan. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mendukung hal ini melalui kebijakan yang pro-investasi lokal, pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur dan ekosistem inovasi daerah.

Dengan demikian, diversifikasi ekonomi bukan hanya pilihan, tetapi menjadi **strategi adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.** Pendekatan ini akan menjadikan struktur ekonomi daerah lebih tangguh, inklusif, dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2. Hasil Estimasi Indeks Williamson dan Gini Ratio Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah, alat analisis pembangunan menjadi salah satu kunci. Alat analisis pembangunan daerah berfungsi untuk mengukur, mengevaluasi, dan merumuskan strategi pembangunan ekonomi serta sosial di suatu wilayah (Todaro, 2018). Secara

umum, alat-alat ini membantu pemerintah daerah, peneliti, dan perencana dalam memahami kondisi, potensi, dan permasalahan wilayah agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu, Indeks Williamson menjadi salah satu alat analisis untuk menentukan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Setelah di bahas terkait hasil dari alat analisis pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan 2025 (LQ, *Shift Share* dan Tipologi Klassen), tahapan berikutnya untuk semakin memperdalam hasil analisis dilakukan pengujian lanjutan melalui perhitungan Indeks Williamson dan Gini.

Karena beberapa data skunder (PDRB ADHB Kecamatan dan Pengeluaran Individu) dari lembaga resmi yang dibutuhkan belum di publish, maka forecasting merupakan salah satu pilihan terbaik. Analisis data forecasting adalah proses memprediksi atau memperkirakan nilai suatu variabel di masa depan berdasarkan data historis (data masa lalu) dan pola yang terbentuk di dalamnya (Rosya, 2024). Dalam konteks pembangunan daerah, forecasting digunakan untuk memperkirakan arah dan besaran perkembangan ekonomi, sosial, atau fiskal di masa mendatang agar kebijakan yang dibuat lebih antisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Box, et al., 2016).

PDRB ADHK kecamatan dan pengeluaran individu penduduk Kabupaten Pasuruan dilakukan *forecasting* (ARIMA) untuk mengetahui besaran angka pada tahun 2025 berdasar data time series minimal 5 (lima) tahun. Sebelum dilakukan *forecasting*, data-data tersebut dilakukan uji stasioneritas dan signifikansi menggunakan SPSS 26. Uji stasioneritas dan signifikansi merupakan dua langkah penting dalam analisis *forecasting* (peramalan) berbasis data runtun waktu (*time series*) untuk menentukan konstruk ARIMA (Box-Jenkins, 2008). Data dikatakan stasioner jika rata-rata (mean), varians, dan kovariansnya konstan sepanjang waktu. Model statistik seperti ARIMA atau regresi *time series* hanya valid jika data yang digunakan bersifat stasioner (Febiola dkk., 2024).

Hasil pengujian stationeritas dan signifikansi dapat dilihat pada tabel 5.5. berikut:

Tabel 5. 5 Uji Stationeritas dan Signifikansi Indeks Willamson dan Gini Kabupaten Pasuruan

Model Statistics											
Model	Number of Predictors							Ljung-Box Q(18)	DF	Sig.	Number of Outliers
								Statistics			
Williamson-Model 1	0	0,225	-0,924	14,237	2,749	7,279	6,233		0	0,316	0
Gini-Model 2	0	0,076	0,238	173,703	113,206	71,924	11,236		0	0,442	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025.

Hasil pengujian *stationeritas* untuk Indeks Willamson menunjukkan angka 0,225 atau lebih dari 0,05 yang artinya data memiliki tingkat konsistensi yang bagus untuk dilakukan analisis lanjutan. Sedangkan hasil pengujian signifikansi menunjukkan angka 0,316 atau lebih dari 0,05 artinya data yang diuji dapat memberikan dampak nyata pada hasil perhitungan forecasting. Untuk Indeks Gini, hasil uji stationeritas menunjukkan angka 0,076 atau lebih dari 0,05 yang artinya data memiliki tingkat konsistensi yang bagus untuk dilakukan analisis lanjutan. Sedangkan hasil uji signifikansi menunjukkan angka 0,442 atau lebih dari 0,05 yang artinya hasil pengujian data dapat memberikan dampak nyata terhadap angka perhitungan *forecasting*.

5.2.1. Hasil Estimasi Indeks Willamson dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Tahapan awal dalam melakukan analisis Indeks Willamson tahun 2025 ini adalah mengumpulkan data-data PDRB ADHB dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian pada tahap selanjutnya, PDRB ADHB kecamatan tersebut didistribusikan (dibagi) dengan jumlah penduduk yang bertujuan untuk mengetahui nilai PDRB per kapita kecamatan. Adapun hasil

forecasting PDRB ADHB Kecamatan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025

dapat dilihat pada tabel 5.6. berikut:

Tabel 5. 6 Forecasting PDRB ADHB Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (dalam Miliar)

Kecamatan	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Purwodadi	6.256.790	6.244.619	6.740.386	7.386.230	7.997.650	8.659.683	9.958.635
Tutur	4.864.836	4.855.372	5.240.846	5.702.065	6.174.073	6.685.153	7.687.926
Puspo	2.549.124	2.544.165	2.746.149	2.994.201	3.242.056	3.510.428	4.036.993
Tosari	1.736.121	1.732.743	1.870.308	2.037.039	2.205.662	2.388.243	2.746.480
Lumbang	3.070.500	3.064.527	3.307.823	3.596.139	3.893.821	4.216.145	4.848.567
Pasrepan	4.730.007	4.720.806	5.095.595	5.559.698	6.019.921	6.518.240	7.495.976
Kejayan	5.943.378	5.931.817	6.402.750	6.995.868	7.574.974	8.202.018	9.432.321
Wonorejo	5.403.329	5.392.818	5.820.960	6.385.493	6.914.074	7.486.409	8.609.371
Purwosari	7.603.526	7.588.735	8.191.213	9.031.092	9.778.671	10.588.133	12.176.353
Prigen	7.863.573	7.848.276	8.471.360	9.271.931	10.039.446	10.870.495	12.501.069
Sukorejo	7.931.125	7.915.697	8.544.133	9.430.425	10.211.060	11.056.315	12.714.763
Pandaan	10.495.627	10.475.209	11.306.848	12.555.245	13.594.548	14.719.883	16.927.865
Gempol	12.065.888	12.042.416	12.998.477	14.356.679	15.545.101	16.831.900	19.356.684
Beji	7.575.242	7.560.506	8.160.743	8.975.234	9.718.189	10.522.645	12.101.042
Bangil	8.022.018	8.006.413	8.642.051	9.446.552	10.228.522	11.075.223	12.736.506
Rembang	5.949.603	5.938.029	6.409.455	7.083.125	7.669.455	8.304.320	9.549.968
Kraton	8.554.562	8.537.921	9.215.755	10.107.765	10.944.469	11.850.435	13.628.000
Pohjentrek	2.730.086	2.724.775	2.941.098	3.230.875	3.498.321	3.787.907	4.356.093
Gondangwetan	5.299.072	5.288.764	5.708.645	6.359.006	6.885.394	7.455.356	8.573.659
Rejoso	4.281.858	4.273.528	4.612.808	5.090.836	5.512.247	5.968.542	6.863.823
Winongan	3.911.146	3.903.537	4.213.444	4.604.459	4.985.608	5.398.309	6.208.055
Grati	7.035.284	7.021.599	7.579.051	8.284.223	8.969.978	9.712.498	11.169.373
Lekok	6.950.433	6.936.912	7.487.641	8.283.796	8.969.515	9.711.997	11.168.797
Nguling	5.052.663	5.042.834	5.443.190	5.886.192	6.373.442	6.901.025	7.936.179
Kab. Pasuruan	145.875.791	145.592.018	157.150.726	172.654.170	186.946.200	202.421.301	232.784.496

*Data Forecasting

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Setelah data-data PDRB ADHB Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 hingga 2024 dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan forecasting (ARIMA) tahun 2025. Untuk itu dalam analisis ini sengaja menggunakan *margin err* sebesar 5%. Budiwaskito (2011), berpendapat bahwa penggunaan margin err dengan tingkat kepercayaan data yang sangat baik (optimis) umumnya berkisar antara 2 - 5%, sedangkan untuk data dengan tingkat kepercayaan moderat, dapat menggunakan margin error 6 – 10% dan untuk penggunaan data yang dianggap kurang meyakinkan (pesimis) dapat menggunakan margin err sebesar >10%.

Setelah melakukan analisis forecasting untuk PDRB ADHB, berikutnya dilakukan analisis untuk menentukan PDRB per kapita kecamatan. Hasil

perhitungan PRDB per kapita masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 5.7.

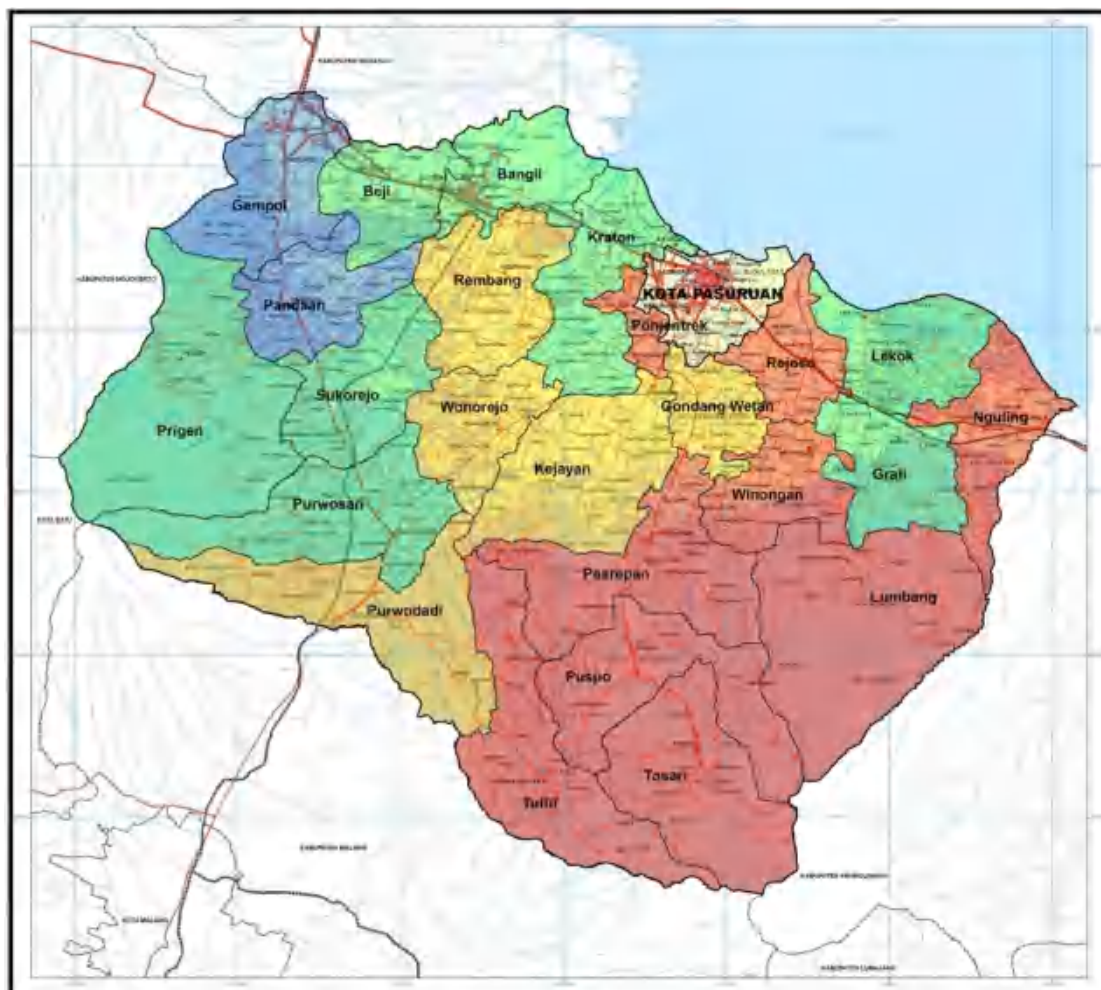
Tabel 5. 7 PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, 2025
(dalam Miliar)

Kecamatan	Tahun						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Purwodadi	6.256.790	6.244.619	6.740.386	4.562.119	4.992.365	5.422.610	6.236.002
Tutur	4.864.836	4.855.372	5.240.846	3.521.891	3.854.035	4.186.179	4.814.105
Puspo	2.549.124	2.544.165	2.746.149	1.849.374	2.023.785	2.198.197	2.527.926
Tosari	1.736.121	1.732.743	1.870.308	1.258.181	1.376.838	1.495.495	1.719.819
Lumbang	3.070.500	3.064.527	3.307.823	2.221.162	2.430.636	2.640.110	3.036.126
Pasrepan	4.730.007	4.720.806	5.095.595	3.433.958	3.757.809	4.081.659	4.693.908
Kejayan	5.943.378	5.931.817	6.402.750	4.321.011	4.728.518	5.136.025	5.906.429
Wonorejo	5.403.329	5.392.818	5.820.960	3.944.012	4.315.965	4.687.918	5.391.106
Purwosari	7.603.526	7.588.735	8.191.213	5.578.071	6.104.129	6.630.187	7.624.716
Prigen	7.863.573	7.848.276	8.471.360	5.726.825	6.266.912	6.807.000	7.828.050
Sukorejo	7.931.125	7.915.697	8.544.133	5.824.720	6.374.039	6.923.359	7.961.862
Pandaan	10.495.627	10.475.209	11.306.848	7.754.771	8.486.110	9.217.449	10.600.067
Gempol	12.065.888	12.042.416	12.998.477	8.867.430	9.703.702	10.539.974	12.120.970
Beji	7.575.242	7.560.506	8.160.743	5.543.570	6.066.375	6.589.179	7.577.556
Bangil	8.022.018	8.006.413	8.642.051	5.834.681	6.384.940	6.935.198	7.975.478
Rembang	5.949.603	5.938.029	6.409.455	4.374.906	4.787.496	5.200.085	5.980.098
Kraton	8.554.562	8.537.921	9.215.755	6.243.080	6.831.854	7.420.629	8.533.723
Pohjentrek	2.730.086	2.724.775	2.941.098	1.995.556	2.183.753	2.371.951	2.727.744
Gondangwetan	5.299.072	5.288.764	5.708.645	3.927.652	4.298.062	4.668.472	5.368.743
Rejoso	4.281.858	4.273.528	4.612.808	3.144.364	3.440.904	3.737.444	4.298.060
Winongan	3.911.146	3.903.537	4.213.444	2.843.952	3.112.161	3.380.369	3.887.425
Grati	7.035.284	7.021.599	7.579.051	5.116.766	5.599.320	6.081.873	6.994.154
Lekok	6.950.433	6.936.912	7.487.641	5.116.502	5.599.031	6.081.560	6.993.793
Nguling	5.052.663	5.042.834	5.443.190	3.635.618	3.978.487	4.321.356	4.969.559
Kab. Pasuruan	89.637.550	90.656.810	97.449.840	106.640.170	116.697.225	126.754.279	145.767.421

*Data Forecasting

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Dari hasil analisis PDRB per kapita kecamatan tersebut, jika dijabarkan dalam bentuk peta akan diketahui sebaran daerah mana saja yang tergolong penduduk berpendapatan: (i) sangat tinggi; (ii) tinggi; (iii) sedang; dan (iv) rendah (lihat gambar 5.1). Kecamatan yang mendominasi pendapatan sangat tinggi dan tinggi setiap tahun hampir tidak berubah yaitu wilayah barat dan sebagian wilayah timur Kabupaten pasuruan. Sedangkan untuk kecamatan yang mendominasi pendapatan perkapita rendah hingga sedang, umumnya berada di bagian selatan dan timur Kabupaten Pasuruan.



Gambar 5. 1. Peta Sebaran PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Dari gambar 5.1. dapat dipahami bahwa kecamatan yang tergolong berpendapatan perkapita **sangat tinggi (warna biru)** diantaranya: (i) Gempol; dan (ii) Pandaan. Sedangkan kecamatan dengan pendapatan perkapita **tinggi (warna hijau)** diantaranya: (i) Lekok; (ii) Grati; (iii) Beji; (iv) Purwosari; (v) Prigen; (vi) Sukorejo; (vii) Bangil; dan (viii) Kraton. Untuk kecamatan yang mendominasi pendapatan perkapita **sedang (warna orange)** diantaranya: (i) Gondangwetan; (ii) Wonorejo; (iii) Kejayan; (iv) Rembang; dan (v) Purwodadi. Untuk kecamatan yang mendominasi pendaptan perkapita **rendah (warna merah)** diataranya: (i) Tosari;

(ii) Puspo; (iii) Pohjentrek; (iv) Lumbang; (v) Winongan; (vi) Rejoso; (vii) Pasrepan; (viii) Tukur; dan (ix) Nguling.

Secara umum, sektor ekonomi kecamatan yang tergolong berpendapatan perkapita sangat tinggi didominasi oleh: (i) industri; (ii) perdagangan; dan (iii) jasa. Sedangkan untuk kecamatan yang tergolong berpendapatan perkapita tinggi sektor ekonominya didominasi oleh: (i) industri; (ii) perdagangan; dan (iii) jasa. Untuk kecamatan yang tergolong berpendapatan perkapita sedang, sektor ekonominya didominasi oleh: (i) sektor pertanian; (ii) sebagian perdagangan; dan (iii) industri. Kecamatan yang tergolong dalam pendapatan perkapita rendah, sektor ekonomi umumnya lebih didominasi oleh: (i) pertanian; dan (ii) peternakan. Kecamatan dengan pendapatan perkapita rendah di Kabupaten Pasuruan berdasar hasil survey, sebagian besar berada di wilayah yang terisolir secara geografis dan ekonomi, serta berada di wilayah timur Kabupaten Pasuruan.

Hasil perhitungan PDRB Perkapita Kecamatan di Kabupaten Pasuruan tersebut, berikutnya dimasukkan dalam formula untuk mengetahui angka Indeks Willamson. Indeks ini umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah, dalam hal ini adalah masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Bisa dipahami juga, indeks ini menunjukkan seberapa besar perbedaan tingkat pembangunan atau pendapatan antarwilayah, sehingga dapat membantu perencana pembangunan menilai pemerataan hasil pembangunan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Rumus yang umum dipakai dalam perhingan Indeks Willamson yaitu sebagaimana berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n f_i(Y_i - \bar{Y})^2/n}}{\bar{Y}}$$

Di mana:

IW : Indeks Willamson

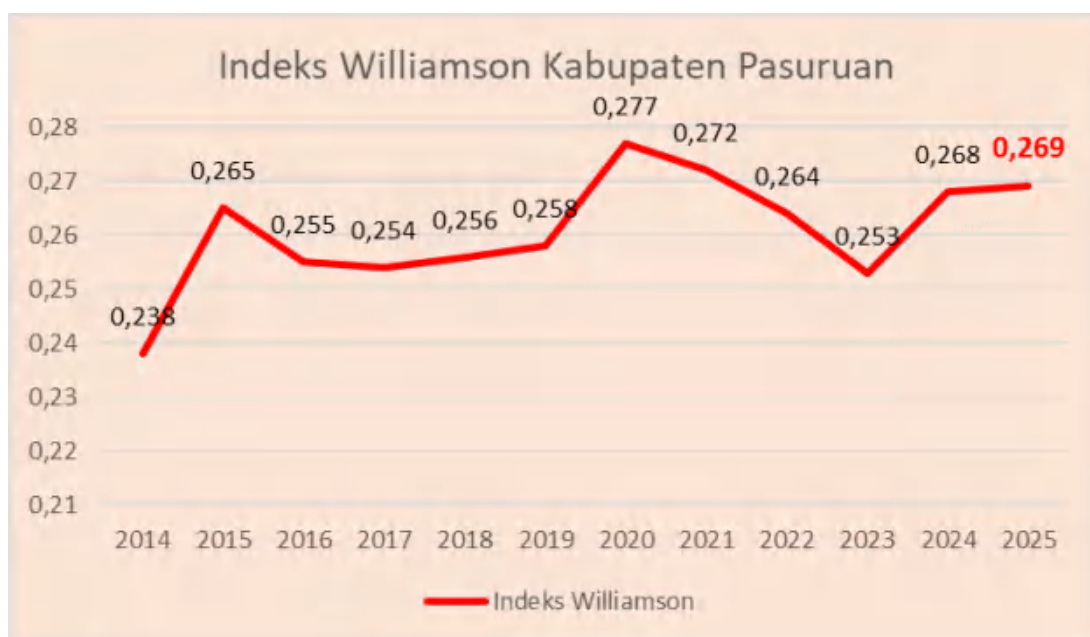
Y_i : Pendapatan perkapita wilayah ke-i

\hat{Y} : Rata-rata pendapatan perkapita seluruh wilayah

f_i : Jumlah penduduk wilayah ke-i

n : Jumlah wilayah yang dibandingkan

Setelah data-data yang ada di masukkan dalam rumus tersebut, maka hasil perhitungan angka Indeks Willamson dapat dilihat pada gambar 5.2.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Gambar 5. 2. Indeks Willamson Kabupaten Pasuruan Tahun 2014 - 2025

Dari gambar 5.2. dapat dipahami bahwa pada tahun 2014 hingga 2025, angka Indeks Willamson tergolong fluktuatif. Angka Indeks Willamson pada tahun 2014 sebesar 0,238 (rendah), meningkat menjadi 0,265 pada tahun 2015 (rendah), turun menjadi 0,255 pada tahun 2016, turun menjadi 0,254 pada tahun 2017, meningkat menjadi 0,256 pada tahun 2018, kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,258, meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 0,277 karena adanya guncangan wabah Covid-19 tetapi masih masuk dalam kategori rendah, pada tahun 2021 turun menjadi 0,272, kembali turun di tahun 2022 menjadi 0,264, dan kembali mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 0,253. Pada tahun 2024,

angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 0,268, dan sedikit meningkat (cenderung stagnan) pada tahun 2025 menjadi 0,269 (rendah).

Beberapa indikasi yang menyebabkan nilai Indeks Williamson di Kabupaten Pasuruan cenderung stagnan dibanding tahun lalu yaitu beberapa isu-isu pembangunan hingga saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Adapun isu-isu pembangunan yang muncul hingga saat ini berdasar hasil survey lapang diantaranya:

1. Ketimpangan pembangunan antar wilayah (barat, tengah dan timur) di Kabupaten Pasuruan masih menjadi tantangan tersendiri lantaran wilayah barat lebih di topang oleh sektor industri, wilayah tengah yaitu sektor jasa, industri, perdagangan dan sebagian pertanian. Sedangkan wilayah timur penopang utama pembangunan lebih terfokus pada sektor pertanian dan peternakan. Selain itu berdasar hasil analisis survey lapang, kawasan timur Kabupaten Pasuruan (seperti Kecamatan Lumbang, Tosari, Puspo, dan Grati) masih tertinggal dibanding wilayah tengah dan barat dari sisi infrastruktur, kesehatan, serta pendidikan.
2. Berdasar hasil survey, masih tingginya angka pengangguran terbuka di kawasan industri (Kecamatan Purwosari, Sukorejo, Gempol) serta minimnya lapangan kerja di sektor pertanian dan agroindustri yang menuntut kebijakan peningkatan investasi dan hilirisasi industri.
3. Permasalahan jalan rusak, kurangnya jaringan air bersih, serta penanganan banjir lintas wilayah menjadi perhatian utama untuk mendukung mobilitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.
4. Lebih dari 70% struktur APBD Kabupaten Pasuruan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan peningkatan optimalisasi pajak daerah dan retribusi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Isu tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang sering berulang menjadi fokus kebijakan pengendalian lingkungan, konservasi air, serta penguatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.

Sedangkan langkah-langkah strategis pemerintah yang saat ini dianggap mulai dirasakan oleh masyarakat berdasar hasil survey diantaranya:

1. Penguatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal seperti Bromo–Tosari, wisata agro Nongkojajar, dan kawasan pesisir nelayan, serta peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi dan digital marketing.
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pasuruan Satu Data, serta digitalisasi pelayanan untuk mendorong efisiensi dan transparansi sektor publik.
3. Pemerintah daerah memprioritaskan program seperti Satu Kecamatan Satu Sekolah Olahraga, program *Boarding School*, serta Pasuruan *Coaching and Creativity Center* untuk pengembangan kreativitas anak muda.
4. Perbaikan dan pembangunan jalan poros kabupaten dengan standar hotmix atau cor beton, menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mobilitas dan distribusi barang antar wilayah. Program perbaikan 33 ruas jalan sudah direncanakan dengan alokasi dana sekitar Rp 80 miliar melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
5. Pencarian sumber baru dan pipanisasi air bersih untuk daerah yang mengalami kekurangan air, terutama di wilayah pegunungan dan pesisir utara. Pembangunan jaringan distribusi air bersih ini diarahkan agar memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesulitan air bersih.

6. Pengembangan drainase dan penanganan banjir terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai upaya mitigasi bencana banjir yang kerap terjadi di beberapa kecamatan kritis.
7. Pembangunan dan perbaikan sarana pendukung seperti jembatan strategis untuk membuka akses dan mempermudah konektivitas berbagai daerah terpencil.
8. Pengembangan kawasan permukiman dan infrastruktur sosial seperti kesehatan, pendidikan, serta sarana keagamaan dan budaya, sebagai bagian dari pembangunan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9. Pemerintah daerah giat mendorong partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui kegiatan seperti Pasuruan Agriculture Festival yang menumbuhkan minat menjadi petani milenial. Program ini menghubungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan inovasi pasar melalui pameran produk unggulan dan pembinaan usaha tani.
10. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) dijalankan di seluruh kecamatan sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok seperti beras, gula, minyak, dan telur. Gerakan ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus memperkuat sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan merata antarwilayah.
11. Kabupaten Pasuruan juga melaksanakan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di sejumlah desa seperti Ngembal dan Tukur. Program ini mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan menjadi sumber pangan mandiri melalui budidaya sayur, ikan, dan tanaman obat keluarga.

Langkah strategis tersebut walaupun perlu dioptimalkan, akan tetapi sebagian besar secara linier sesuai dengan tema besar pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemerataan, Produktivitas, dan Ketahanan Daerah.”

Arah kebijakan utama tersebut meliputi:

1. Pemerataan pembangunan wilayah timur.
2. Optimalisasi pendapatan daerah dan kemandirian fiskal.
3. Transformasi digital tata kelola pemerintahan.
4. Penguatan SDM dan pendidikan berbasis vokasi.
5. Inovasi pertanian berkelanjutan dan pengendalian bencana.

Dengan fokus ini, strategi pembangunan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 bertujuan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi, pemerataan sosial, serta pembangunan ekologis yang seimbang antarwilayah dan berkelanjutan.

5.2.2. Hasil Estimasi Indeks Gini dalam Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Gini Rasio, Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (atau kesejahteraan) di suatu wilayah (Todaro, 2018). Semakin besar nilai Gini Rasio, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Secara konseptual, Indeks Gini menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan penduduk menyimpang dari distribusi yang merata sempurna. Jika seluruh penduduk memiliki pendapatan yang sama, maka Gini Rasio = 0 (pemerataan sempurna). Sebaliknya, jika satu orang menguasai seluruh pendapatan, maka Gini Rasio = 1 (ketimpangan sempurna).

Terdapat 2 (dua) cara yang umum digunakan untuk menghitung koefisien gini diantaranya:

1. Pendekatan berdasar data kelompok pendapatan/pengeluaran.

Jika data pendapatan/pengeluaran dibagi ke dalam beberapa kelompok (desil atau kuintil), digunakan rumus:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n (Y_i + Y_{i-1})(X_i - X_{i-1})$$

X_i : Persentase kumulatif penduduk sampai kelompok ke-i

Y_i : Persentase kumulatif pendapatan sampai kelompok ke-i

n : Jumlah kelompok pendapatan (misal: 5 kuintil atau 10 desil)

Berdasar hasil hitungan tersebut, dapat diinterpretasikan sebagaimana berikut (Permendagri No. 54 Tahun 2015):

- a. $KG < 0,3$ terklasifikasi sebagai disparitas rendah;
- b. $0,3 < KG < 0,5$ klasifikasi sebagai disparitas sedang;
- c. $KG > 0,5$ terklasifikasi sebagai disparitas tinggi

2. Berdasar Kurva Lorenz.

Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara persentase kumulatif penduduk (sumbu X) dan persentase kumulatif pendapatan/pengeluaran (sumbu Y). Garis diagonal (45°) = distribusi pendapatan merata sempurna. Semakin melengkung kurva Lorenz \rightarrow semakin timpang distribusi pendapatan \rightarrow Gini Rasio makin tinggi.

Berdasar pada hasil *forecasting* data pengeluaran penduduk Kabupaten Pasuruan secara *time series* dari tahun 2014 hingga 2024, maka nilai pengeluaran rata-rata penduduk dapat dilihat pada tabel 5.8.

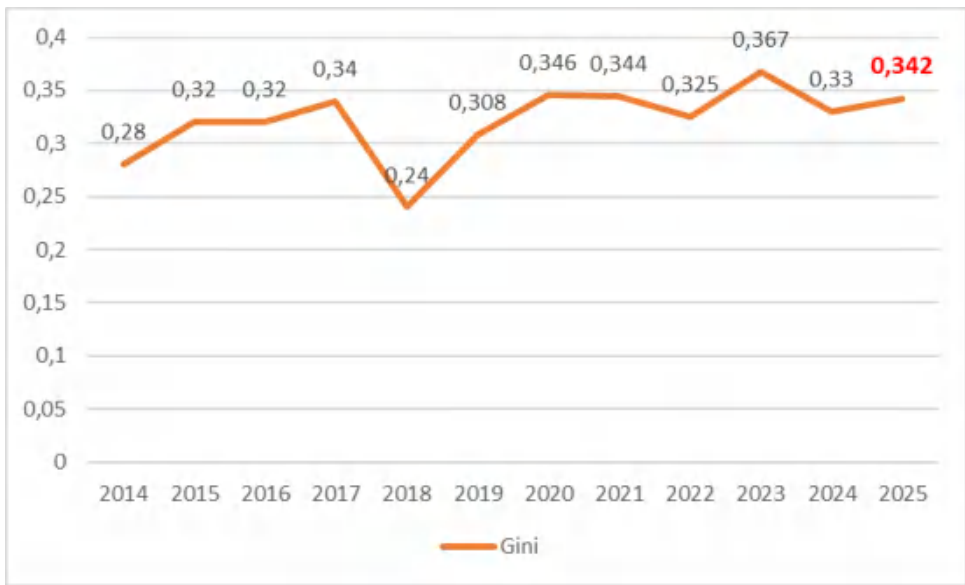
Tabel 5. 8 Kelompok Pengeluaran, Rata-rata pengeluaran perkapita, Proporsi Jumlah Penduduk, dan Persentase Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

kelompok pengeluaran	rata-rata pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
		P	P
< 711021	714.560	137072,43	15,325
711021 - 1218648	1.267.413	269054,39	30,081
1218649 - 1726276	1.933.550	186227,47	20,821
1726277 - 2233904	2.595.889	127575,14	14,263
2233905 - 2741532	3.299.009	76980,2	8,607
2741533 - 3249160	3.906.510	36658,16	4,098
3249161 - 3756788	4.658.598	23742,62	2,654
3756789 - 4264416	5.359.488	16727,865	1,870
4264417 - 4772044	6.060.621	2934,855	0,328
4772045 - 5279672	6.543.042	9178,785	1,026
5279673 - 5787300	7.445.653	5799,255	0,648
5787301 - 6294928	7.732.825	284,13	0,032
≥ 6294929	9.054.203	2206,05	0,247
Total Penduduk	4.659.336	894441,35	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Dari tabel 5.8. tersebut dapat dipahami bahwa dari total penduduk Kabupaten Pasuruan 2025, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran adalah Rp 4.659.336. Angka tersebut tergolong mengalami peningkatan di banding tahun 2024 yaitu Rp 4.235.760. Sedangkan proporsi pengeluaran penduduk tertinggi dikuasai oleh kelompok dengan pengeluaran antara Rp 711.021 – 1.218.648 yang mencapai 30%. Urutan kedua yaitu kelompok pengeluaran antara Rp 1.218.649 – 1.726.276 yang mencapai 20,8%. Selanjutnya, yang menempati urutan ke tiga yaitu kelompok pengeluaran kurang dari Rp 711.021 yang mencapai 15,32%.

Setelah data-data tersebut dimasukkan dalam rumus Indeks Gini, maka di dapat angka sebagaimana gambar 5.3.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

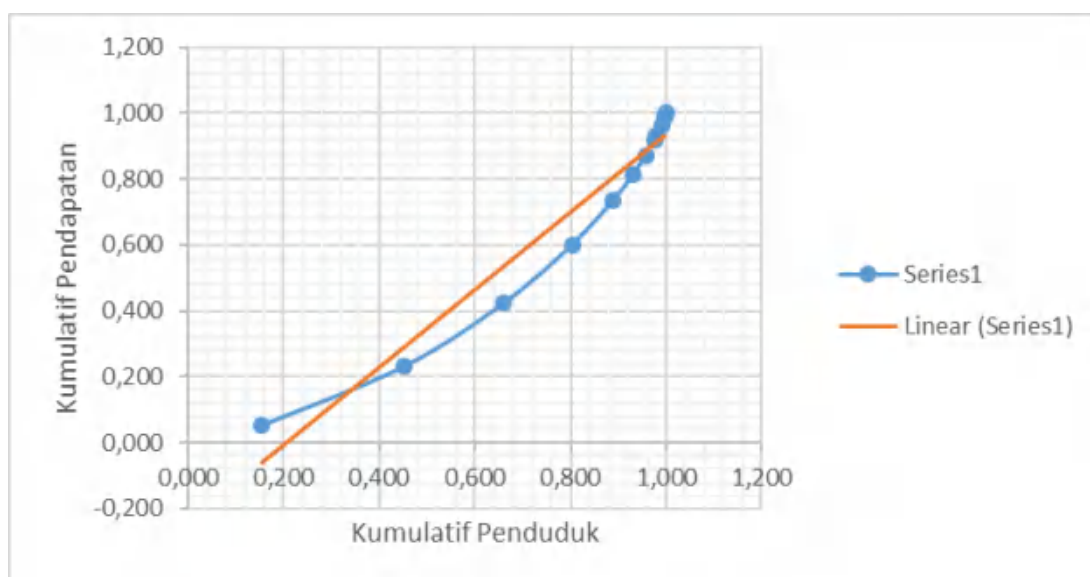
Gambar 5. 3. Nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, 2014-2025

Dari gambar 5.3. dapat dipahami bahwa dari tahun 2014 hingga 2025, nilai Indeks Gini di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi. Akan tetapi nilai tersebut dalam hal ketimpangan berdasar Permendagri No. 54 Tahun 2015 masih masuk kategori rendah hingga sedang. Pada tahun 2014, nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan sebesar 0,28 (ketimpangan rendah), mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0,32 (sedang), stagnan di tahun 2016 yaitu 0,32 (sedang), mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 0,34 (sedang), turun di tahun 2018 menjadi 0,24 (rendah), mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 0,308 (sedang), kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 0,346 (sedang), sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 0,344 (sedang), turun kembali di tahun 2022 menjadi 0,325 (sedang), mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 0,367 (sedang), mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 0,33 (sedang), dan meningkat di tahun 2025 menjadi 0,342 (ketimpangan sedang).

Terjadinya trend peningkatan disparitas penduduk di Kabupaten Pasuruan berdasar beberapa hasil analisis lapang diantaranya:

1. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan lebih pesat di wilayah tertentu, sementara sektor pertanian yang dominan di daerah lain kurang berkembang. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area perkotaan dan industri juga menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi sekaligus berdampak pada kualitas lingkungan.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga kesenjangan pendapatan melebar. Hal ini menandakan bahwa meski ekonomi tumbuh, distribusi hasilnya belum optimal.
3. Pengaruh globalisasi ekonomi yang berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok serta penurunan yang cukup signifikan terhadap daya beli masyarakat. Hal ini tidak lain lantaran ketergantungan industri pada bahan baku impor (*cost push inflation*).

Untuk memperjelas bentuk sebaran distribusi pendapatan berdasar hasil perhitungan Indeks Gini, langkah berikutnya dilakukan penggambaran dalam bentuk Kurva Lorens (lihat gambar 5.4.)



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Gambar 5. 4. Kurva Lorenz (Proporsi Persebaran Pengeluaran/Pendapatan Penduduk) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

Jika garis kurva Lorenz tersebut mendekati atau hampir bersinggungan dengan garis diagonal, artinya tingkat kesenjangan penduduk di Kabupaten Pasuruan masuk kategori rendah. Sedangkan jika garis Kurva Lorenz tersebut semakin menjauhi garis diagonal, maka tingkat kesenjangan penduduk di Kabupaten Pasuruan masuk kategori sedang atau tinggi.

5.3. Hasil Identifikasi Penyebab Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Hasil analisis data sekunder dalam penelitian ini kurang lengkap rasanya jika tidak dilakukan *cross check* menggunakan data primer melalui survey dan pengisian kuisioner oleh responden. Hasil survey tersebut selanjutnya di olah menggunakan alat-alat statistik sebagai sarana mempermudah identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pasuruan. Data primer didapatkan dari 154 responden yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Harapannya dari hasil survey yang telah dilakukan, terdapat informasi untuk mengetahui sinkronisasi capaian kebijakan yang selama ini diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan ke masyarakat, serta justifikasi secara kuantitatif dan kualitatif yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan strategi serta pengambilan kebijakan.

Tahapan dalam membentuk konstruk analisis data, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Uji validitas dan realibilitas data

Pengujian data primer berdasar hasil survey menggunakan alat statistik Smart PLS 3. Pengujian dalam Smart PLS 3 umumnya terdiri dari beberapa indikator diantaranya: (i) *Cronbach's Alpha*; (ii) *Composite Reability (CR)*; (iii)

Average Variance (AVE). *Cronbach's Alpha* adalah ukuran klasik dari reliabilitas internal konsistensi indikator dalam satu konstruk. *Alpha* mengasumsikan semua indikator memiliki bobot yang sama (*tau-equivalence*), sehingga kurang fleksibel dibanding *Composite Reliability*. *Composite Reliability* adalah ukuran reliabilitas internal dari konstruk laten (variabel laten) dalam model PLS-SEM. CR menunjukkan sejauh mana indikator-indikator yang membentuk suatu konstruk konsisten dalam mengukur konstruk tersebut. AVE adalah ukuran validitas konvergen (*convergent validity*), yaitu seberapa besar varian indikator yang dijelaskan oleh konstruk laten dibandingkan dengan varian error-nya.

Berdasar hasil pengujian data menggunakan Smart PLS 3, *Cronbach's Alpha*, *Composite Reability (CR)*, *Average Variance (AVE)* dapat di lihat sebagai mana tabel 5.9 berikut:

Tabel 5. 9 Hasil Pengujian Konsistensi, Validitas, dan Pembobotan Data di Masing-masing Variabel

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Implementasi Program	0.950	0.951	0.964	0.869
Isolasi Geografis	0.936	0.949	0.947	0.624
Kesenjangan Wilayah	1.000	1.000	1.000	1.000
Sumberdaya Ekonomi	0.946	0.947	0.954	0.699

Sumber: Hasil Analisis Data, 2025.

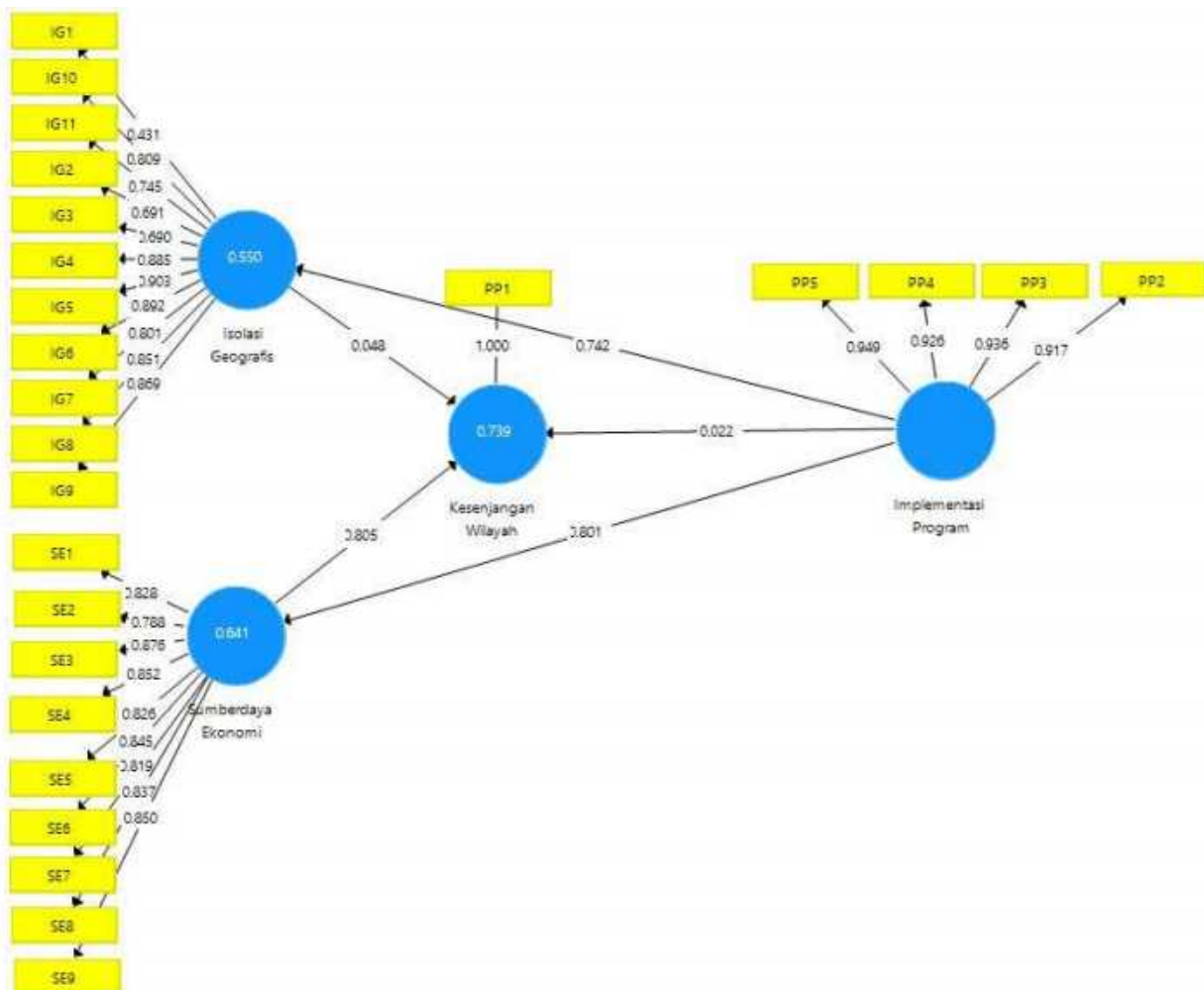
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian pembobotan data di masing-masing variabel berdasar *Cronbach's Alpha* memiliki hasil: (i) variabel implementasi program (implementasi kebijakan pemerintah) memperoleh bobot 0,95 yang artinya 95% data dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki bobot yang baik dalam menjelaskan variabel; (ii) keterisolasian geografis memperoleh bobot 0,936 yang artinya 93,6% data dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan variabel; (iii) kesenjangan wilayah memiliki bobot 1,00 atau 100% data mampu menjelaskan variabel; dan (iv) sumberdaya ekonomi memperoleh bobot 0,946 atau 94,6% data mampu menjelaskan variabel.

Pengujian menggunakan CR (*Composite Reliability*) untuk: (i) implementasi program memperoleh bobot 0,964 atau 96,4% variabel mampu secara konsisten menjelaskan pengaruh terhadap variabel lain; (ii) isolasi geografis memperoleh bobot 0,947 atau 94,7% variabel mampu menjelaskan secara konsisten pengaruhnya terhadap variabel lain; (iii) kesenjangan wilayah memperoleh bobot 1.00 atau 100% yang artinya variabel mampu menjelaskan secara konsisten pengaruhnya terhadap variabel lain; dan (iv) sumberdaya ekonomi memperoleh bobot 0,954 atau 95,4% variabel mampu menjelaskan secara konsisten pengaruhnya terhadap variabel lain.

Pengujian tahap ke tiga yaitu *average variance* dengan hasil sebagaimana berikut: (i) implementasi program memperoleh bobot 0,869 atau 86,9% data-data dalam variabel mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lain; (ii) isolasi geografis memperoleh bobot 0,624 atau 63,4% data-data dalam variabel mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lain; (iii) kesenjangan wilayah memperoleh bobot 1.00 atau 100% data-data dalam variabel mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lain; dan (iv) sumberdaya ekonomi memperoleh bobot 0,699 atau 69,9% data-data dalam variabel mampu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lain.

2. Pembentukan model SEM PLS (*Structural Equation Modeling-Partial Least Square*)

Setelah data, variabel dan model statistik telah di uji serta dinyatakan valid, langkah berikutnya yaitu membentuk konstruk SEM PLS. Konstruk SEM PLS sendiri dipahami sebagai konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi direpresentasikan oleh beberapa indikator (*manifest variables* atau *observed variables*). Hasil perhitungan data survey Indeks Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pasuruan setelah dimasukkan dalam konstruk SEM PLS dapat dilihat pada gambar 5.5.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 5. 5. Hasil Analisis Variabel yang Mempengaruhi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Dari gambar 5.5 dapat dipahami bahwa kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama diantaranya: (i) implementasi program pemerintah; (ii) sumberdaya ekonomi; dan (iii) keterisolasian geografis. Akan tetapi, tiap-tiap faktor menunjukkan besaran pengaruh yang berbeda. Ada yang pengaruhnya sangat besar, ada juga yang pengaruhnya kecil. Dari konstruk gambar 5.5 tersebut, selama ini program-program pemerintah Kabupaten Pasuruan (pembangunan sarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, pembangunan dan peningkatan kualitas

sarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumberdaya pendidikan) terfokus pada pengembangan sumberdaya ekonomi dan keterisolasian geografis daerah. Tak ayal, pengaruh langsung (*direct effect*) pembangunan hasil kebijakan tersebut terhadap sumberdaya ekonomi mencapai 80,1%, dan keterisolasian geografis mencapai 74,2%. Sedangkan pengaruh langsung kebijakan terhadap kesenjangan wilayah hanya mencapai 2%.

Langkah yang di ambil ini dirasa sudah tepat lantaran pemerintah Kabupaten Pasuruan selama ini memfokuskan kebijakannya untuk pembangunan jangka panjang. Hal ini terlihat dari pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) kebijakan pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat (direpresentasikan dalam bentuk variabel penyusun **sumberdaya ekonomi**) seperti: (i) peningkatan produktivitas masyarakat melalui kemudahan perizinan usaha (digitalisasi birokrasi) dan pemberian insentif bagi UMKM memiliki pengaruh sebesar 82,8% dalam pembangunan ekonomi; (ii) pengurangan pengangguran (dalam bentuk pemberian insentif dan dukungan investasi, kolaborasi dan sinergi antar sektoral, serta peningkatan kapasitas melalui inovasi dan digitalisasi) memberikan pengaruh 78,8% terhadap pembangunan ekonomi; (iii) peningkatan jumlah orang terdidik (kebijakan dalam bentuk sekolah rakyat, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, pemetaan anak tidak sekolah) memberikan kontribusi 87,6% terhadap pembangunan ekonomi; (iv) peningkatan skill penduduk melalui Mobile Training Unit, pelatihan di BLK, dan pelatihan soft skill memberikan kontribusi sebesar 85,2% terhadap pembangunan ekonomi; (v) modernisasi teknologi seperti Smart City dan Digitalisasi Layanan Publik, Desa Digital & SAPA WARGA, Modernisasi Pertanian & Industri, Digitalisasi Ekosistem UMKM & Ekonomi Kreatif, memberikan kontribusi sebesar 82,6% dalam pembangunan ekonomi; (vi) dorongan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan inovasi masyarakat

memberikan kontribusi sebesar 84,5% dalam pembangunan ekonomi; (vii) kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan jaringan kerja sama pemasaran produk masyarakat memberikan kontribusi sebesar 81,9% dalam pembangunan ekonomi; (viii) implementasi kebijakan dalam bentuk keterbukaan informasi pasar seperti: Digitalisasi Pasar & UMKM Go Digital, Pasar Digital Desa & Fasilitasi E-Commerce, Integrasi Data Ekonomi Kreatif, memberikan kontribusi sebesar 83,7% dalam pembangunan ekonomi; dan (xi) implementasi kebijakan dalam bentuk kerja sama dengan mitra swasta melalui Edukasi & Pendampingan Intensif guna meningkatkan mitra pemasara produk masyarakat memberikan kontribusi sebesar 85% dalam pembangunan ekonomi.

Setelah mengetahui *indirect effect* kebijakan pemerintah terhadap sumberdaya ekonomi, pembahasan berikutnya yaitu terkait *indirect effect* kebijakan pemerintah terhadap penyelesaian permasalahan keterisolasian geografis. Terdapat 11 variabel penyusun keterisolasian geografis yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan pemerintah diantaranya: (i) keterbatasan akses karena tipologi geografis (daerah terpencil) memberikan kontribusi sebesar 43,1% dalam keterisolasian geografis atau lebih dari 56,9% responden beranggapan bahwa daerah terpencil sudah memperoleh kemudahan melalui kebijakan dari pemerintah; (ii) implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan melalui pemanfaatan potensi desa memberikan 69,1%; (iii) implementasi kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan tata guna lahan memberikan kontribusi sebesar 69%; (iv) implementasi kebijakan pemerintah dalam mempermudah akses kesehatan bagi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 88,5%; (v) implementasi kebijakan pemerintah dalam mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 90,3%; (vi) implementasi kebijakan pemerintah

dalam mempermudah akses birokrasi bagi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 89,25%; (vii) implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kemudahan akses memperoleh air bersih bagi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 80,1%; (viii) implementasi kebijakan pemerintah dalam mempermudah penyediaan akses informasi terutama secara digital memberikan kontribusi sebesar 85,1%; (ix) implementasi kebijakan pemerintah dalam mempermudah akses menuju pasar memberikan kontribusi sebesar 86,9%; (x) implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan kualitas jalan memberikan kontribusi sebesar 74,5%; (xi) implementasi kebijakan pemerintah dalam menjaga konsistensi keberadaan tersedianya air bersih memberikan kontribusi sebesar 80,9%.

Memang, kebijakan pemerintah dalam jangka panjang berdasar hasil survey menitikberatkan pada sumberdaya ekonomi dan permasalahan keterisolasian geografis. Akan tetapi, sumbangsih terbesar dalam meningkatkan pembangunan wilayah yang berdampak pada reduksi kesenjangan antar kecamatan adalah peningkatan sumberdaya ekonomi. Sumberdaya ekonomi berperan sebesar 80,5% dalam menentukan besar kecilnya nilai kesenjangan wilayah. Sedangkan keterisolasian geografis, hanya berperan sebesar 4,8%.

5.4. Rumusan Strategi Pembangunan dalam Mengatasi Kesenjangan Wilayah di Kabupaten Pasuruan

Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, *grand strategy* perlu ditetapkan untuk mengetahui langkah seperti apa yang sesuai dalam pengimplementasian strategi pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. *Grand strategy* ditetapkan berdasarkan hasil analisis perhitungan data yang

didapatkan dari hasil pengisian kuisioner masyarakat di masing-masing kecamatan Kabupaten Pasuruan. Dalam menentukan *grand strategy* dilakukan penilaian dalam kuadran SWOT dengan metode pembobotan pada tiap aspek internal maupun eksternal, kemudian ditentukan ratingnya yang selanjutnya dapat ditentukan posisi kedudukannya pada kuadran SWOT. Nilai bobot merupakan nilai pada tiap elemen yang terdapat pada aspek internal maupun eksternal. Nilai rating adalah nilai faktor yang menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kesenjangan pembangunan wilayah di Kabupaten Pasuruan. Penentuan nilai bobot dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel *Component Score* tiap variabel yang berpengaruh terhadap kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan (Tabel 5.10).

Tabel 5. 10 Component Score Tiap Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan

Variabel	Component Score		
	C1	C2	C3
Keterisolasian Geografis (X _{1.1})	-.054	-.111	.430
Potensi Alam Desa/Kel (X _{1.2})	-.079	-.055	.430
Jenis Guna Lahan (X _{1.3})	-.066	-.044	.380
Akses Menuju Sarana Kesehatan (X _{2.1})	-.113	.204	.030
Akses Menuju Sarana Pendidikan (X _{2.2})	-.096	.205	-.005
Akses Birokrasi (X _{2.3})	-.125	.209	.047
Akses Air Bersih (X _{2.4})	-.085	.190	-.023
Akses Informasi (X _{2.5})	-.095	.197	-.003
Akses Pasar (X _{2.6})	-.104	.205	.004
Jalan (X _{3.1})	-.036	.163	-.073
Air Bersih (X _{3.2})	-.019	.157	-.112
Jumlah Penduduk Usia Produktif (X _{4.1})	.109	-.093	.102
Jumlah Pengangguran (X _{4.2})	.118	-.092	.073
Tingkat Pendidikan (X _{5.1})	.140	-.095	.043
Skill (X _{5.2})	.120	-.083	.065
Penggunaan Teknologi Modern (X _{6.1})	.147	-.083	-.011
Inovasi (X _{6.2})	.142	-.060	-.038
Jaringan Pemasaran (X _{7.1})	.153	-.116	.039
Informasi Pasar (X _{7.2})	.147	-.090	.012
Kemitraan dengan Pihak Lain (X _{8.1})	.136	-.059	-.019

Variabel	Component Score		
	C1	C2	C3
Dukungan Pemerintah (X _{8.2})	.144	-.074	-.003
Kondisi Fisik Kesehatan (X _{9.1})	.103	.041	-.141
Kondisi Non Fisik Kesehatan (X _{9.2})	.107	.023	-.118
Kondisi Fisik Pendidikan (X _{10.1})	.065	.099	-.173
Kondisi Non Fisik Pendidikan (X _{10.2})	.082	.075	-.152

Sumber : Hasil analisis faktor, 2025

Sesuai hasil *rotated component matrix* dalam analisis faktor, ketiga *component score* akan dijumlahkan yang nantinya akan digunakan untuk nilai bobot atau tingkat kepentingan tiap variabel pada analisis SWOT. Sehingga dapat menjadi bahan perhitungan dalam penentuan faktor strategis.

Tabel 5. 11 Nilai Bobot Tiap Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan

Variabel	Nilai	Bobot
Internal		
Keterisolasian Geografis (X _{1.1})	0,20014	0,165036
Potensi Alam Desa/Kel (X _{1.2})	0,19417	0,160112
Jenis Guna Lahan (X _{1.3})	0,15069	0,124263
Akses Menuju Sarana Kesehatan (X _{2.1})	0,05529	0,045589
Akses Menuju Sarana Pendidikan (X _{2.2})	0,05127	0,042275
Akses Birokrasi (X _{2.3})	0,06152	0,050726
Akses Air Bersih (X _{2.4})	0,04385	0,036163
Akses Pasar (X _{2.6})	0,05286	0,043587
Jalan (X _{3.1})	0,03319	0,027372
Air Bersih (X _{3.2})	0,03755	0,030968
Jumlah Penduduk Usia Produktif (X _{4.1})	0,03093	0,025509
Jumlah Pengangguran (X _{4.2})	0,02772	0,022856
Tingkat Pendidikan (X _{5.1})	0,03047	0,025129
Skill (X _{5.2})	0,02551	0,021039
Penggunaan Teknologi Modern (X _{6.1})	0,02862	0,0236
Inovasi (X _{6.2})	0,02521	0,020787
Dukungan Pemerintah (X _{8.2})	0,02622	0,021622
Kondisi Fisik Kesehatan (X _{9.1})	0,03217	0,026529
Kondisi Non Fisik Kesehatan (X _{9.2})	0,02590	0,021359
Kondisi Fisik Pendidikan (X _{10.1})	0,04396	0,036246
Kondisi Non Fisik Pendidikan (X _{10.2})	0,03545	0,029235

Variabel	Nilai	Bobot
Eksternal		
Akses Informasi (X _{2.5})	0,04784	0,345636
Jaringan Pemasaran (X _{7.1})	0,03839	0,277315
Informasi Pasar (X _{7.2})	0,02985	0,21567
Kemitraan dengan Pihak Lain (X _{8.1})	0,02234	0,161378

Sumber: Hasil analisis faktor, 2025, diolah

Hasil analisis faktor menunjukkan terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Nilai rating ditentukan berdasarkan urutan nilai eigen yang terdapat pada masing-masing komponen. Nilai eigen merupakan jumlah keragaman total yang dapat dijelaskan oleh setiap faktor dan mempunyai persentase keragaman kumulatif telah mencapai sekurang-kurangnya 60%. Pemilihan variabel inti yang dapat mewakili sekelompok variabel adalah dengan memilih variabel yang mempunyai nilai eigen > 1 (Maholtra, 1993 dalam Zaini Fanani, 2003).

Tabel 5. 12 Nilai Rating Tiap Variabel yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan

No	Komponen	Nilai Eigen	Rating
1	Faktor Sumberdaya Ekonomi	8.532	4
2	Faktor Aksesibilitas	6.673	3
3	Faktor Keterisolasian Geografis	2.714	1

Sumber : Hasil analisis faktor, 2025, diolah

A. IFAS (Internal Factor Analysis Summary)

IFAS ditujukan untuk menilai bobot dari keseluruhan faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dalam kesenjangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Tabel berikut merupakan tabel penilaian variabel kekuatan dan kelemahan dari Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5. 13 IFAS Kabupaten Pasuruan, 2025

No.	Variabel	Bobot	Rating	Nilai
I	Kekuatan (<i>Strength</i>)			
I.1	Potensi Alam Desa/Kel di Kabupaten Pasuruan yang Melimpah	0,160112	1	0,160112
I.2	Jenis guna lahan yang masih didominasi oleh lahan pertanian	0,124263	1	0,124263
I.3	Kemudahan akses menuju sarana kesehatan	0,045589	3	0,136766
I.4	Kemudahan akses menuju sarana pendidikan	0,042275	3	0,126824
I.5	Kemudahan akses menuju kantor pemerintahan	0,050726	3	0,152178
I.6	Kemudahan akses menuju air bersih	0,070029	3	0,210086
I.7	Kemudahan akses pasar	0,123883	3	0,371648
I.8	Kondisi jaringan jalan yang baik	0,002716	3	0,008149
I.9	Jumlah penduduk usia produktif yang besar	0,062593	4	0,250373
I.10	Tingkat pendidikan yang cukup tinggi	0,030394	4	0,121578
I.11	Penggunaan teknologi dalam proses produksi	0,006665	4	0,02666
I.12	Dukungan pemerintan dalam pengembangan skill	0,034858	4	0,139431
I.13	Kondisi fisik sarana kesehatan yang baik	0,106054	4	0,424215
I.14	Kondisi fisik sarana pendidikan yang baik	0,077593	4	0,310372
Total I				2,562655
II	Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
II.1	Masih terdapat keterisolasian geografis pada beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan	0,008271	1	0,008271
II.2	Masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih	0,240394	3	0,721182
II.3	Jumlah pengangguran yang meningkat	0,07052	4	0,28208
II.4	Skill masyarakat yang masih terbatas	0,05641	4	0,22564
II.5	Inovasi yang belum terlalu berkembang	0,021213	4	0,084852
II.6	Kondisi non fisik kesehatan yang perlu ditingkatkan	0,024039	4	0,096155
II.7	Kondisi non fisik pendidikan yang perlu ditingkatkan	0,027458	4	0,109832
Total II				1,528012
	Selisih			1,034643

Sumber: Hasil analisis, tahun 2025

B. EFAS (*External Factor Analysis Summary*)

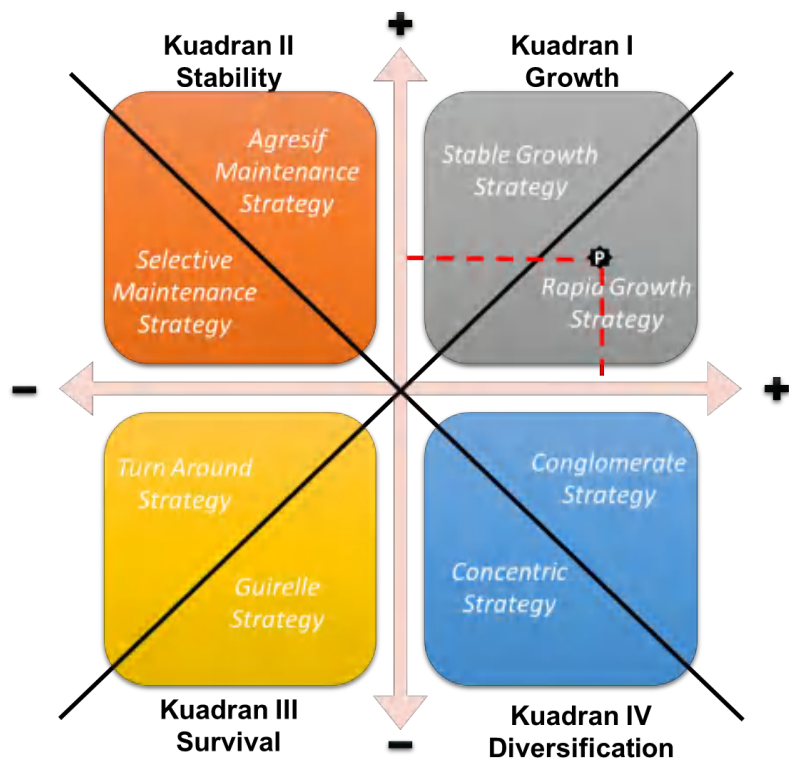
EFAS ditujukan untuk menilai bobot dari keseluruhan faktor-faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dalam kesenjangan pembangunan wilayah di Kabupaten Pasuruan. Tabel berikut merupakan tabel penilaian variabel peluang dan ancaman dari Kabupaten Pasuruan.

Tabel 5. 14 EFAS Kabupaten Pasuruan, 2025

No.	Variabel	Bobot	Rating	Nilai
I	Peluang (<i>Opportunity</i>)			
I.1	Informasi pasar yang akurat	0,060732	4	0,242928
I.2	Akses informasi yang semakin mudah	0,639533	3	1,9186
Total I				2,161528
II	Tantangan (<i>Threat</i>)			
II.1	Jaringan pemasaran yang masih lemah	0,15701	4	0,628041
II.2	Kemitraan dengan pihak lain yang belum banyak terjalin	0,142724	4	0,570898
Total II				1,198939
Selisih				0,962589

Sumber: Hasil analisis., 2025

Selanjutnya nilai bobot dan rating dari masing-masing elemen dikalikan dengan besarnya faktor internal yang terdiri dari aspek kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang ada pada setiap unsur sehingga dapat ditentukan besarnya faktor internal (sumbu x) dan faktor eksternal (sumbu y).



Sumber: Hasil analisis, tahun 2025

Gambar 5. 6 Posisi Kabupaten Pasuruan dalam Kuadran SWOT, 2025

Berdasarkan kedudukannya dalam kuadran SWOT, terlihat bahwa posisi Kabupaten Pasuruan terletak pada posisi kuadran I dengan titik koordinat (1,034643; 0,962589) yang berarti mendukung strategi *growth*. Nilai x positif menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki Kabupaten Pasuruan lebih besar daripada kelemahannya, dan nilai y yang juga positif menunjukkan kondisi eksternalitas, bahwa peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan lebih besar daripada ancaman dari luar. Hal tersebut berarti Kabupaten Pasuruan mempunyai peluang yang lebih besar dalam mengatasi ancaman, dan Kabupaten Pasuruan harus tetap memaksimalkan kekuatan yang dimiliki agar dapat mengatasi berbagai ancaman yang muncul. **Sama dengan tahun sebelumnya, strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan (*growth oriented strategy*)** (Rangkuti, 2015), artinya meskipun menghadapi ancaman, Kabupaten Pasuruan memiliki kekuatan internal yang harus

diptimalisasi dan memaksimalkan peluang yang ada dalam membuat inovasi program baru sehingga dapat memanfaatkan peluang jangka panjang.

Lebih khusus lagi, Kabupaten Pasuruan berada pada ruang A, yaitu *Rapid Growth Strategy*. Strategi pengembangan pada ruang tersebut adalah strategi pertumbuhan yang cepat dengan memperhatikan pengembangan maksimal untuk target yang menjadi prioritas sehingga dapat tercapai dalam waktu lebih singkat. Bagi daerah seperti Kabupaten Pasuruan, *rapid growth strategy* penting untuk **mempercepat peningkatan PDRB dan menarik investasi industri**. Namun, strategi ini harus disertai **diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan sektor pendukung (pertanian, perdagangan, jasa) agar pertumbuhan yang cepat juga berkelanjutan dan inklusif**.

Problematika pembangunan di Kabupaten Pasuruan berdasar pada hasil analisis pada dasarnya **bukan disebabkan adanya keterisolasian geografis**. Hal ini dikarenakan permasalahan isolasi geografis oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan telah ditekan dengan baik melalui implementasi berbagai macam kebijakan. Akan tetapi, problematika ketimpangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang terjadi beberapa tahun terakhir disebabkan adanya polarisasi pembangunan ekonomi yang cenderung tidak merata antara wilayah timur, tengah, dan barat (perbedaan sumberdaya ekonomi).

Wilayah barat Kabupaten Pasuruan merupakan cluster pembangunan utama lantaran di topang dengan adanya sentra-sentra industri, jasa, dan perdagangan. Sedangkan wilayah tengah dan timur, pembanguana perekonomian lebih dititikberatkan pada sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan. Tak ayal, besaran perputaran roda ekonomi (*velocity of money, trade, and money supply*) antara wilayah barat, tengah, dan timur menjadi cukup timpang. Untuk itu, beberapa kebijakan yang bisa diambil berdasar hasil analisis SEM menggunakan Smart PLS 3 dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rumusan kebijakan dalam hal

pembangunan, dan pemerataan pendapatan. Adapun rumusan kebijakan terkait pemerataan pembangunan dapat dilihat pada tabel 5.15, sedangkan untuk pemerataan pendapatan dapat dilihat pada tabel 5.16.

Tabel 5. 15 Rumusan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
Pembangunan dari Pemerintah				
1	Terdapat 8,3% responden yang belum sepenuhnya menikmati secara menyeluruh dampak pembangunan fisik sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan pembangunan sarana kesehatan hingga daerah terpencil (pelosok), • Integrasi infrastruktur kesehatan dengan transportasi dan telekomunikasi, • Optimalisasi penggunaan teknologi kesehatan digital (telemedicine), • Peningkatan investasi dan edukasi di bidang kesehatan. 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tukur, Pasrepan, dan Lumbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan: Pembangunan dan pengelolaan fasilitas, peningkatan SDM kesehatan; • Dinas PUPR: Pembangunan infrastruktur pendukung sarana kesehatan (jalan, air, listrik); • Dinas Tenaga Kerja: Pelatihan tenaga kerja lokal sektor kesehatan; • Dinas Koperasi & UMKM: Pengembangan usaha penunjang sarana kesehatan; • Dinas Pariwisata / Bappelitbangda: Integrasi dengan pengembangan ekonomi daerah dan wisata kesehatan
2	Terdapat 6,4% responden yang belum menikmati dampak secara menyeluruh pembangunan sumberdaya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi di sektor layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan, • Penurunan pengeluaran akibat sakit dan peningkatan pendapatan keluarga sehat 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tukur, Pasrepan, dan Lumbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan: Pengembangan kapasitas dan distribusi Sumberdaya Manusia Kesehatan; • Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi: Peningkatan penyediaan tenaga kerja kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; • Dinas Tenaga Kerja: Program vokasi dalam memanfaatkan <i>AI</i> dan <i>Big Data</i> bagi tenaga kesehatan serta penempatan kerja secara efektif dan efisien bagi tenaga kesehatan; • Dinas Koperasi & UMKM: Dukungan usaha penunjang sektor kesehatan
3	Terdapat 7,4% responden yang belum menikmati dampak secara menyeluruh pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>Smart School</i> guna mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pendidikan, • Pengembangan inkubator bisnis pendidikan dan kewirausahaan muda di masing-masing kecamatan, • Pengadaan festival inovasi siswa dan pameran produk pendidikan, • Pengembangan kurikulum berbasis riset dan teknologi tepat guna, • Pengembangan pusat inovasi daerah (<i>innovation hub</i>) berbasis lembaga pendidikan 	Seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan: Pembangunan dan pengelolaan sarana serta kurikulum berbasis ekonomi lokal serta modernisasi pendidikan; • Dinas Tenaga Kerja: penyediaan lembaga vokasi dalam pengembangan inkubator bisnis pendidikan dan kewirausahaan muda; • Dinas Koperasi & UMKM: penyediaan sarana pendukung pendidikan melalui pameran produk inovasi siswa; • Dinas PUPR: pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dan peningkatan sarana pendidikan

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
4	Terdapat 5,1% responden yang belum menikmati secara menyeluruh dampak dari pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan ekosistem "<i>knowledge-based economy</i>" di daerah melalui integrasi lembaga pendidikan, riset, dan bisnis dalam satu klaster ekonomi pengetahuan, • Dukungan finansial dan insentif bagi start-up atau inovasi karya manusia terdidik, • Menjadikan pendidikan sebagai penggerak transformasi ekonomi komunitas melalui <i>community learning center</i> 	Seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan: Pengembangan SDM pendidikan dan peningkatan mutu lulusan; • Dinas Tenaga Kerja: vokasi dan pelatihan modernisasi teknologi tepat guna bagi siswa; • Dinas Koperasi & UMKM: Dukungan wirausaha muda dan inkubasi bisnis

Tabel 5. 16 Rumusan Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Pasuruan

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
1	Terdapat 43,1% responden yang masih mengalami keterisolasian geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Skema subsidi logistik dan transportasi bagi wilayah terisolasi, • Pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan, • Peningkatan infrastruktur internet dan layanan digital di daerah terisolasi, • Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan 	Purwodadi, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Wonorejo, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondang Wetan, Rejoso, Winongan.	<ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbangda & Dinas PU: Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan; • Dinas Kominfo: Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur digital di wilayah terisolir; • Dinas Perhubungan: Subsidi transportasi dan logistik antarwilayah; • Dinas Koperasi & UMKM: Peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal; • Dinas Pertanian, Kelautan, dan Pariwisata: Pengembangan komoditas unggulan; • Perguruan Tinggi & Komunitas Lokal: Inovasi dan pendampingan masyarakat
2	Terdapat 30,9% responden yang masih belum menikmati secara penuh atas keberadaan pengelolaan potensi desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan data spasial dan digitalisasi profil desa, • penyediaan sisten rantai nilai (<i>value chain</i>) dari hulu (produksi) sampai hilir (pemasaran) berbasis lokal, • Kolaborasi pembentukan pasar antar desa (<i>inter-village cooperation</i>) untuk menyerap produk masyarakat 	Kecamatan Grati, Kecamatan Beji, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tukur, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Kejayan, dan Kecamatan Sukorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa & BUMDes: optimalisasi pengelolaan usaha dan potensi lokal; • Dinas PMD & Bappelitbangda: Pembinaan dan integrasi kebijakan ekonomi desa; • Dinas Koperasi & UMKM: Pendampingan usaha mikro dan akses permodalan; • Dinas Pertanian / Pariwisata: optimalisasi pengembangan potensi sektor unggulan; • Perguruan Tinggi: Pendampingan inovasi dan riset terapan; • Swasta & Investor Lokal: Kemitraan usaha dan penyerapan produk lokal
3	Terdapat 31% responden yang masih belum menikmati secara penuh atas peningkatan pengembangan tata kelola lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan potensi tataguna lahan, inovasi dalam diversifikasi dan intensifikasi lahan produktif, • penguatan pendampingan dalam optimalisasi keberlanjutan lahan dan ekonomi hijau 	Kecamatan Grati, Kecamatan Beji, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tukur, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Mengawasi dan membina penerapan prinsip berkelanjutan; • Pemerintah Desa / BUMDes: Menjadi motor penggerak usaha produktif berbasis lahan; • Dinas Koperasi & UMKM: Fasilitasi penguatan kelembagaan ekonomi rakyat; • Dinas Kominfo / Smart Village Unit: Mendukung digitalisasi peta lahan dan akses pasar online; • Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan: Melakukan pembinaan, pelatihan, serta penyediaan sarana produksi pertanian.

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
4	Terdapat 11,5% responden yang masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan akses kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan memperluas fasilitas kesehatan dasar (puskesmas, klinik pratama, posyandu, rumah sakit tipe D/C) di wilayah terpencil, • Menyediakan layanan kesehatan keliling dan telemedicine untuk menjangkau daerah sulit akses, • Memperbanyak dan meratakan tenaga medis dan paramedis ke wilayah perdesaan, • Membangun sistem insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tutur, Pasrepan, dan Lumbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan: Menyusun dan melaksanakan program pelayanan kesehatan masyarakat serta pengawasan fasilitas; • Bappelitbangda: Mengintegrasikan pembangunan kesehatan ke dalam rencana pembangunan ekonomi daerah; • BPJS Kesehatan: Menjamin keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat; • Pemerintah Desa / BUMDes: Mengelola klinik desa, posyandu, dan kegiatan promotif-preventif di tingkat lokal; • Lembaga Pendidikan: Memberikan edukasi kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga lokal; • Sektor Swasta (CSR / Klinik Swasta): Berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas dan teknologi kesehatan di daerah terpencil.
5	Terdapat 9,7% responden yang merasa masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan akses pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan teknologi pendidikan (e-learning) untuk daerah dengan keterbatasan tenaga pengajar, • Mendorong literasi digital dan teknologi bagi siswa serta tenaga pengajar 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tutur, Pasrepan, dan Lumbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan: Merancang dan mengimplementasikan program pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan; • Pemerintah Desa / BUMDes: Mengelola program beasiswa, pelatihan masyarakat, dan pusat belajar lokal; • Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan: Melakukan riset dan pengembangan kurikulum berbasis potensi lokal
6	Terdapat 10,8% responden yang merasa masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan akses birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • lebih menggencarkan prosedur perizinan usaha dan layanan administrasi publik melalui sistem terpadu satu pintu (OSS dan Mall Pelayanan Publik), • lebih memperkuat kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam pengelolaan administrasi, perencanaan, dan keuangan publik, 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tutur, Pasrepan, dan Lumbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Bappelitbangda: Mengintegrasikan reformasi birokrasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah; • Dinas Penanaman Modal & PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu): Menyederhanakan dan mempercepat layanan perizinan usaha; • Badan Kepegawaian Daerah (BKD): Meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN; • Pemerintah Desa dan Kecamatan: Melaksanakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat dan usaha mikro

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
7	Terdapat 19,9% responden yang merasa kesulitan dalam mengakses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan merehabilitasi jaringan distribusi air bersih di wilayah rawan air, Menerapkan teknologi hemat air dan sistem pemantauan digital (smart water management), Melindungi daerah resapan air, hutan lindung, dan sempadan sungai. 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tukur, Pasrepan, Winongan, dan Lumbang	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa & BUMDes: Mengelola SPAM desa dan menjamin keberlanjutan layanan air bersih lokal; Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Melindungi sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan lingkungan
8	Terdapat 14,9% responden yang merasa masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan pengembangan akses informasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pusat informasi publik atau digital center di tingkat desa (Desa Digital), Menghubungkan pemerintah, universitas, media, dan komunitas digital dalam penyediaan informasi ekonomi, Menyediakan sistem informasi harga komoditas, iklim, dan permintaan pasar bagi petani dan UMKM 	Seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika): Pembangunan infrastruktur TIK, penyediaan data publik, dan edukasi literasi digital; Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan: Menyediakan informasi harga, pasar, dan pelatihan digitalisasi usaha; Pemerintah Desa / BUMDes: Menyediakan akses informasi lokal melalui pusat data atau platform digital desa; Lembaga Pendidikan & Komunitas Digital: Melatih masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan literasi data
9	Terdapat 13,1% responden yang merasa masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan pengembangan akses pasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur pasar tradisional dan modern agar layak, higienis, dan efisien, Mengembangkan platform digital desa untuk promosi dan penjualan produk lokal, Menarik investasi baru di sektor perdagangan dan pariwisata 	Seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perdagangan / Perindustrian: Meningkatkan infrastruktur pasar, promosi dagang, dan fasilitasi ekspor; Bank Daerah / Lembaga Keuangan Mikro: Menyediakan akses permodalan, pembiayaan usaha, dan layanan keuangan digital; Perguruan Tinggi: Menjadi mitra pengembangan usaha, riset pasar, dan pendampingan inovasi bisnis

No	Permasalahan	Strategi	Lokasi	Pelaksana
10	Terdapat 19,1% responden yang merasa masih belum menikmati secara penuh atas adanya peningkatan pembangunan aksesibilitas jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jalan usaha tani, jalan menuju kawasan industri kecil, dan jalan pariwisata, • Menjamin keberlanjutan pemanfaatan jalan, • Meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tukur, dan Pasrepan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Pelaksana teknis pembangunan, perawatan, dan peningkatan kualitas jalan; • Dinas Perhubungan: Mengatur lalu lintas, keselamatan, dan konektivitas antar moda transportasi; • Dinas Pertanian, Perindustrian, dan Pariwisata: Mengidentifikasi kebutuhan akses jalan ke sentra produksi, industri kecil, dan kawasan wisata; • Pemerintah Desa / BUMDes: Pelaksana pembangunan jalan desa dan pengelola pemanfaatan ekonomi lokal di sekitar jalan
11	Terdapat 25,5% responden yang merasa masih kekurangan sumber daya air di daerahnya	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi daerah resapan air, hutan lindung, dan sempadan sungai, • Menerapkan teknologi hemat air dan sistem pemantauan digital (smart water management) 	Khususnya di Puspo, Tosari, Tukur, dan Pasrepan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa & BUMDes: Mengelola SPAM desa dan menjamin keberlanjutan layanan air bersih lokal; • Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Melindungi sumber daya air dari pencemaran dan kerusakan lingkungan

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan perkembangan kondisi kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan yang didapatkan dari hasil penelitian, baik hasil olah data maupun hasil survey, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dapat di kelompokkan dalam 3 (tiga) fase yaitu: (i) sebelum pandemi Covid-19 (sebelum tahun 2020); (ii) selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021); dan (iii) pasca Covid-19 (setelah tahun 2021). Pada masa sebelum adanya pandemi Covid-19, tingkat kesenjangan wilayah berada di angka 0,24 hingga 0,28 (kategori rendah). Pada masa pandemi Covid-19 berada di angka 0,277 hingga 0,27 (kategori rendah). Dan pasca pandemi Covid-19 berada di angka 0,264 hingga 0,253 (kategori rendah). Selanjutnya pada tahun 2024, terjadi kenaikan Indeks Williamson menjadi 0,268, dan sedikit sekali meningkat menjadi 0,269 pada tahun 2025.
2. Perkembangan indikator makro lainnya yaitu Gini Rasio, di mana pada tahun 2020 sebesar 0,346 (kategori sedang) dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 0,342 (kategori sedang).
3. Berdasarkan hasil pengolahan data lapang, diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam jangka panjang telah menitikberatkan pada sumberdaya ekonomi dan permasalahan keterisolasian geografis. Akan tetapi, sumbangsih terbesar dalam meningkatkan pembangunan wilayah yang berdampak pada reduksi kesenjangan antar kecamatan adalah peningkatan sumberdaya

ekonomi. Sumberdaya ekonomi berperan sebesar 80,5% dalam menentukan besar kecilnya nilai kesenjangan wilayah. Sedangkan keterisolasian geografis, hanya berperan sebesar 4,8%.

6.2. Saran

Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan di masing-masing wilayah kecamatan, didapatkan rekomendasi kebijakan sebagai mana berikut (tabel yang lengkap dengan rincian lokasi serta pelaksananya ada dalam tabel 5.15 dan 5.16 pada bab V):

1. Strategi pemerataan pembangunan Kabupaten Pasuruan, meliputi program berikut:
 - a. Pemerataan pembangunan sarana kesehatan hingga daerah terpencil (pelosok),
 - b. Integrasi infrastruktur kesehatan dengan transportasi dan telekomunikasi,
 - c. Optimalisasi penggunaan teknologi kesehatan digital (*telemedicine*),
 - d. Peningkatan investasi dan edukasi di bidang Kesehatan,
 - e. Peningkatan investasi di sektor layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan,
 - f. Penurunan pengeluaran akibat sakit dan peningkatan pendapatan keluarga sehat,
 - g. Pengembangan *Smart School* guna mendorong tumbuhnya ekonomi digital dan industri kreatif berbasis pendidikan,
 - h. Pengembangan inkubator bisnis pendidikan dan kewirausahaan muda di masing-masing kecamatan,

- i. Pengadaan festival inovasi siswa dan pameran produk pendidikan,
 - j. Pengembangan kurikulum berbasis riset dan teknologi tepat guna,
 - k. Pengembangan pusat inovasi daerah (*innovation hub*) berbasis lembaga Pendidikan,
 - l. Penciptaan ekosistem "*knowledge-based economy*" di daerah melalui integrasi lembaga pendidikan, riset, dan bisnis dalam satu klaster ekonomi pengetahuan,
 - m. Dukungan finansial dan insentif bagi start-up atau inovasi karya manusia terdidik,
 - n. Menjadikan pendidikan sebagai penggerak transformasi ekonomi komunitas melalui *community learning center*.
2. Strategi pemerataan pendapatan Kabupaten Pasuruan, meliputi program berikut:
- a. Skema subsidi logistik dan transportasi bagi wilayah terisolasi,
 - b. Pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi lingkungan,
 - c. Peningkatan infrastruktur internet dan layanan digital di daerah terisolasi,
 - d. Pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan,
 - e. Pemanfaatan data spasial dan digitalisasi profil desa,
 - f. penyediaan sisten rantai nilai (*value chain*) dari hulu (produksi) sampai hilir (pemasaran) berbasis lokal,
 - g. Kolaborasi pembentukan pasar antar desa (*inter-village cooperation*) untuk menyerap produk masyarakat,
 - h. Pemetaan potensi tataguna lahan, inovasi dalam diversifikasi dan intensifikasi lahan produktif,

- i. penguatan pendampingan dalam optimalisasi keberlanjutan lahan dan ekonomi hijau,
- j. Membangun dan memperluas fasilitas kesehatan dasar (puskesmas, klinik pratama, posyandu, rumah sakit tipe D/C) di wilayah terpencil,
- k. Menyediakan layanan kesehatan keliling dan telemedicine untuk menjangkau daerah sulit akses,
- l. Memperbanyak dan meratakan tenaga medis dan paramedis ke wilayah perdesaan,
- m. Membangun sistem insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil,
- n. Memanfaatkan teknologi pendidikan (*e-learning*) untuk daerah dengan keterbatasan tenaga pengajar,
- o. Mendorong literasi digital dan teknologi bagi siswa serta tenaga pengajar,
- p. lebih menggencarkan prosedur perizinan usaha dan layanan administrasi publik melalui sistem terpadu satu pintu (OSS dan Mall Pelayanan Publik),
- q. lebih memperkuat kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam pengelolaan administrasi, perencanaan, dan keuangan public,
- r. Membangun dan merehabilitasi jaringan distribusi air bersih di wilayah rawan air,
- s. Menerapkan teknologi hemat air dan sistem pemantauan digital (*smart water management*),
- t. Melindungi daerah resapan air, hutan lindung, dan sempadan Sungai,
- u. Mengembangkan pusat informasi publik atau digital center di tingkat desa (Desa Digital),

- v. Menghubungkan pemerintah, universitas, media, dan komunitas digital dalam penyediaan informasi ekonomi,
- w. Menyediakan sistem informasi harga komoditas, iklim, dan permintaan pasar bagi petani dan UMKM,
- x. Meningkatkan infrastruktur pasar tradisional dan modern agar layak, higienis, dan efisien,
- y. Mengembangkan platform digital desa untuk promosi dan penjualan produk lokal,
- z. Menarik investasi baru di sektor perdagangan dan pariwisata,
 - aa. Peningkatan jalan usaha tani, jalan menuju kawasan industri kecil, dan jalan pariwisata,
 - bb. Menjamin keberlanjutan pemanfaatan jalan,
 - cc. Meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap infrastruktur,

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2011. *Data Penduduk Jawa Barat dari Tahun ke Tahun*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistika.
- Cowell F. 2009. *Measuring Inequality*. London: Oxford University Press.
- Goul L. 2003. *Matemathical Definition of the Gini Index*. Washington: University of Washington.
- Groth C. 2008. The Gini Index of Inequality. London : *The Journal of Economic Inequality*.
- Harry S. 2008. *Inter-Regional Inequality in Indonesia*. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.
- Lessmann C. 2011. *Regional Inequality and Decentralization*. Dresden: Technische Universitat Dresden.
- Perkin. Reinhardt U. Epstein R. 2001. The Construct Of Lorenz Curves And Of The Gini-Coefficient. Prisceton : Prisceton University.
- Prayitno H. 1996. *Ekonomika Pembangunan*. Jakarta (ID): Ghalia Indonesia
- Sastradipoera K. 1989. *Kegunaan Konsep Koefisien Gini dan Konsep Kesenjangan Pendidikan dalam Pemerataan Kesempatan Pendidikan*. Bandung (ID): Angkasa.
- Skryzhevskaya Y. 2000. *Inequalities of Regional Development in Ukraine: Causes. Consequenses. and Prospects*. Oxford: Miami University.
- Sumaryanto. 1977. *Struktur Penguasaan Tanah di Daerah Lampung*. Jakarta (ID): Balai Pustaka.
- Syafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasinya*. Jakarta (ID): Grasindo.
- Szal R. 1977. *Measuring Income Inequality*. London: The Brooking Institution.
- Tarigan R. 2008. *Ekonomi Regional*. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara.
- Wong F T. 2001. *Aplikasi Statistik Ekstrem dan Simulasi Monte Carlo dalam Penentuan Beban Rencana pada Struktur dengan Umur Guna Tertentu*. Surabaya (ID) : Universitas Kristen Petra.